



Oleh: Dahlan Iskan



DARI kiri ke kanan: James, Erick, dan Lia bersama pasien di rumah sakit.--

Life Wife

KETIKA Disway pagi ini terbit, pemakaman James F. Sundah sedang berlangsung di New York. Upacara itu berlangsung dua jam, berarti selesai pukul 06.00 pagi ini. Itu sudah termasuk kebaktian secara Kristen selama setengah jam di awal acara.

Yang paling istimewa tentu acara terakhir: semua pelayat menyanyikan lagu Lilin Lilin Kecil ciptaan James. Anda bisa mengikuti semua itu secara live. Kalau belum punya link-nya, ini dia (funeraweb.tv/diffusions/123811).

Sebelum itu, doa lima agama dipanjatkan: Kristen Protestan (agama James F. Sundah), Katolik (agama Lia, istrinya), Yahudi, Islam, dan Buddha (sahabat-sahabatnya).

■ Bersambung ke Hal.2

Salurkan Infak Dan Waqaf Terbaik Kita Untuk Pembangunan

GORONTALO ISLAMIC CENTRE

DI BANK MUAMALAT

NO REK : 8120999999

LAPORAN KEUANGAN
MASJID RAYA- GORONTALO ISLAMIC CENTRE

Saldo tanggal 13 Maret 2026	
Bank Muamalat	Rp 2.981.088.175
Bank BSG	Rp 255.174.632
Total Saldo	Rp 3.236.182.807
Total Pertambahan Saldo setelah dikurangi pengeluaran selama 21 s/d 13 Maret 2026	
	Rp 97.371.228

GURU NON-ASN

DPR Desak Segera Angkat Jadi PNS

JAKARTA -GP- Komisi X DPR RI meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pengangkatan guru non ASN yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.

Lalu menilai Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN/Honorer) hanya solusi jangka pendek.

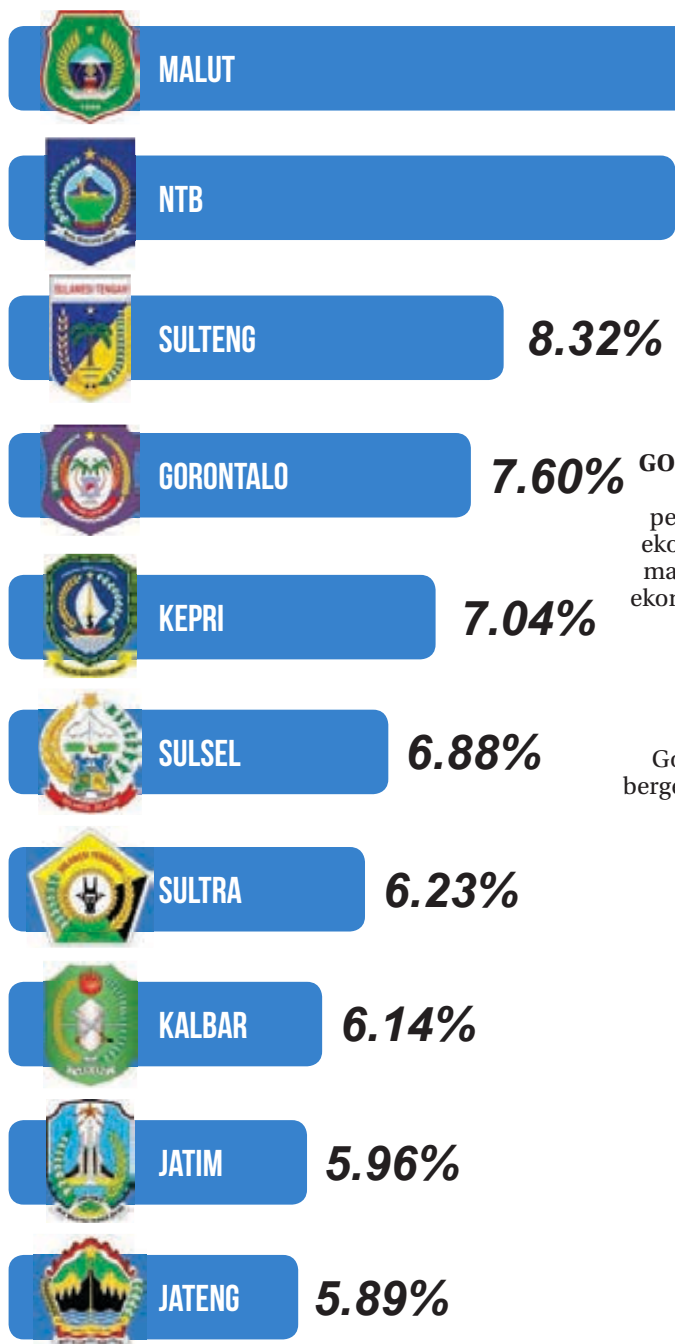
"Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa status guru ini, terutama yang memenuhi kriteria, diangkat semua menjadi PNS. Alasannya apa? Karena hari ini kita kekurangan guru," kata Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan, Senin, 11 Mei 2026.

"Kebutuhan guru kita tidak sesuai antar daerah. Kalau ada yang mengatakan, 'Oh guru kita surplus,' iya,

mungkin di daerah itu surplus, tetapi di daerah lain juga masih kekurangan guru," sambungnya.

Lebih lanjut, Lalu menyambut baik adanya Surat Edaran (SE) No. 7 Tahun 2026 yang melarang Pemda untuk memberhentikan guru non-ASN di tengah transisi menuju penghapusan status guru non-ASN alias honorer tahun ini. Meski demikian, ia meminta pemerintah memperjelas definisi "non-ASN" agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan guru.

Sebab, kata dia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, istilah non-ASN sebenarnya tidak dikenal. Dalam aturan tersebut, ASN hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).



Purbaya: Masih Aman



Purbaya Yudhi Sadewa

JAKARTA -GP- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyampaikan, posisi utang pemerintah per akhir Maret 2026 mencapai sebesar Rp 9.920,42 triliun, atau setara 40,75 Persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Rinciannya mencakup dua jenis utang, yakni Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per akhir Maret 2026 didominasi oleh instrumen SBN yakni Rp 8.652,89 triliun atau 87,22 persen, dan sisanya adalah pinjaman sebesar Rp 1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

Tapi, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, posisi utang pemerintah Indonesia hingga akhir Maret 2026 masih berada dalam kategori aman, meskipun nilainya mengalami kenaikan dibandingkan akhir tahun lalu.

■ Bersambung ke Hal.2

PERTUMBUHAN EKONOMI GORONTALO EMPAT BESAR NASIONAL

GORONTALO - GP - Efisiensi anggaran negara yang diberlakukan pemerintah, ternyata bukan menjadi alasan ekonomi Gorontalo meredup, sebaliknya pertumbuhan ekonomi justeru melambung tinggi, padahal penggerak utama ekonomi di Gorontalo masih dipengaruhi investasi pemerintah melalui APBN maupun APBD. Triwulan I tahun 2026, Gorontalo mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yakni mencapai 7,68 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jika angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai Gorontalo itu hanya kalah dari Sulawesi Tengah 8,32 persen, Nusa Tenggara Barat 13,64 persen, dan Maluku Utara 19,64 persen.

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Mohamad Trizal Entengo menyebut pencapaian itu patut disyukuri oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Gorontalo. Di tengah keterbatasan anggaran yang ada, ekonomi daerah tetap bergeliat bahkan tumbuh di angka tertinggi pascacovid-19 beberapa tahun lalu.

■ Bersambung ke Hal.2

PERANG TERHADAP MIRAS

Adhan Tolak Godaan Uang Ratusan Juta

GORONTALO - GP - Komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam memberantas peredaran minuman keras kembali ditegaskan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat menghadiri silaturahmi bersama masyarakat Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Ahad (10/5/2026).

Di hadapan warga, Adhan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang terhadap peredaran miras karena dianggap menjadi salah satu pemicu utama berbagai persoalan sosial dan gangguan keamanan di tengah masyarakat. "Minuman keras itu sumber masalah. Tidak ada kompromi," tegas Adhan.

Menurutnya, banyak persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat berawal dari pengaruh minuman keras, mulai dari perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindakan kriminal lainnya. "Kalau sudah minum, macam-macam bisa terjadi. Perkelahian, narkoba, semua bisa muncul dari situ," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Adhan juga mengungkapkan pernah mendapat tawaran uang dalam jumlah besar dari pihak tertentu yang meminta agar aturan terkait peredaran miras dilonggarkan. Namun tawaran tersebut ditolaknya.



Adhan Dambea

■ Bersambung ke Hal.2

HEBOH LCC EMPAT PILAR MPR

Juri Nampak Memihak, MPR Minta Maaf

JAKARTA - Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat menuai polemik, lantaran juri dalam perlombaan itu dinilai mempertontonkan ketidakjujuran. Jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan pembawa acara sama persis, namun juri mengurangi nilai dari grup C yang menjawab awal. Aksi penilaian juri yang dinilai curang itu terekam jelas melalui video.

Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyampaikan permohonan maaf terkait insiden penilaian itu. Ia memastikan, MPR RI akan menindaklanjuti kejadian tersebut sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan. “Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” kata Akbar Supratman kepada wartawan, Senin (11/5).

Pimpinan MPR dari unsur DPD RI itu menyayangkan munculnya polemik dalam proses penilaian lomba. Menurutnya, dewan juri

seharusnya dapat bersikap objektif dan responsif terhadap keberatan yang disampaikan peserta selama perlombaan berlangsung. Ia menilai, insiden tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan LCC Empat Pilar di masa mendatang dapat berjalan lebih profesional dan lebih baik. Ia juga menyoroti adanya unsur kelalaian dari panitia maupun dewan juri, terutama dalam aspek teknis tata suara dan mekanisme banding perlombaan.

“Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” tegasnya.

Sebagai informasi, Final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat berlangsung di Pontianak pada Sabtu (9/5). Acara tersebut diikuti oleh sembilan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.

Tiga sekolah yang berhasil melaju ke babak final yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Polemik bermula

saat sesi rebutan pertanyaan, “DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”

Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi tim pertama yang memberikan jawaban. “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” ujar seorang siswi dari Regu C. Namun, dewan juri justru mengurangi nilai Regu C sebesar lima poin, dengan dalih kurang tepat. Pertanyaan kemudian dialihkan kepada regu lain dan dijawab oleh Regu B dari SMAN 1 Sambas.

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” jawab peserta Regu B. Jawaban tersebut dinyatakan benar oleh juri. “Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh,” ucap juri.



(FOTO: TANGKAPAN LAYAR)

ARTIKULASI - Juri menyalahkan jawaban kelompok C dalam LCC Empat Pilar MPR di Kalimantan Barat padahal jawaban sama, dengan alasan artikulasi yang tidak jelas.

Keputusan itu langsung diprotes oleh Regu C, karena merasa telah memberikan jawaban yang sama. “Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B,” tegas peserta Regu C. Juri kemudian menjelaskan bahwa Regu C dianggap tidak menyebutkan unsur “pertimbangan DPD”. Namun, Regu C membantah penjelasan

tersebut dan bahkan meminta audiens memberikan kesaksian. Meski menuai protes, hasil akhir perlombaan tidak mengalami perubahan. Regu B dari SMAN 1 Sambas tetap keluar sebagai juara tingkat provinsi setelah unggul secara keseluruhan atas Regu C dari SMAN 1 Pontianak. (jp)

Utang Pemerintah Hampir Rp 10.000 T

dari halaman 1

Purbaya menegaskan, jumlah itu masih aman karena rasionya masih 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, karena, batas aman jumlah utang pemerintah sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60 persen dari PDB.

“Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi aman,” kata Purbaya dalam media briefing

di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026. Dalam hal ini ia menilai berdasarkan acuan yang paling ketat di Eropa itu rasio utang ke PDB nya 60 persen. “Dan kita masih jauh,” tegasnya.

Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Ia memberi contoh, misalnya seperti Malaysia dengan rasio utang mencapai 60 persen lebih, atau bahkan Singapura yang telah mencapai 180 persen. “Jadi

mereka itu tinggi semua (rasio utangnya). Kita termasuk yang paling hati-hati (mengelola utang) dibandingkan negara-negara sekeliling kita. Dibanding AS juga Jepang,” jelasnya.

Oleh karena itu, Purbaya berharap agar jumlah utang pemerintah itu jangan melalui dilihat dari sisi negatifnya saja.

Ia memastikan bahwa pemerintah akan selalu melakukan pengelolaan utang dengan sangat cermat, sehingga masyarakat justru harusnya

memuji hal tersebut.

“Jadi kalau dilihat dari situ, harusnya Anda puji-puji kita. Cuma

enggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus,” ucapnya. (disway)

Gorontalo Empat Besar...

dari halaman 1

Trizal menyebut pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka-angka. Itu mengindikasikan bahwa iklim investasi tumbuh, perputaran uang semakin baik dan penerimaan negara semakin besar. “Terutama sektor pertambangan yang selama ini belum dirasakan negara manfaatnya sekarang semakin berdampak. Contohnya dari Perusahaan Pani Gold di Pohuwato yang sudah berproduksi. Pada tahap perdana sudah menyumbang sekitar Rp12 miliar ke pemerintah provinsi. Belum bicara penerimaan oleh pemerintah pusat dan kabupaten/kota,” Kata Trizal yang juga sebagai Juru Bicara Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Di sektor pertanian, kualitas petani juga semakin sejahtera dibuktikan dengan nilai tukar petani naik di angka 120,24 poin. Inflasi relarif terkendali 2,60 y-on-y. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,68 persen, kinerja ini

memberi kontribusi sebesar 3,59 persen terhadap total perekonomian Gorontalo. Sementara untuk kawasan Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.

Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo baru-baru ini mengatakan, jika dilihat dari struktur produk domestik regional bruto (PDRB), perekonomian Gorontalo masih digerakkan oleh sektor pertanian dan perdagangan. Kedua lapangan usaha tersebut memberi distribusi bersama sebesar 50 persen. Sementara dari 17 lapangan usaha yang dihitung hanya 15 sektor usaha yang mengalami pertumbuhan.

“Limapuluh persen perekonomian di Gorontalo di triwulan I digerakkan oleh 2 lapangan usaha yakni pertanian dan perdagangan. Dari 17 lapangan usaha yang dihitung, ada 15 lapangan usaha mengalami pertumbuhan sementara 2 lapangan usaha masing-masing sektor jasa pendidikan dan jasa perusahaan mengalami kontraksi,” kata Agus Sudibyo. (tro)

DPR Desak Segera Angkat...

dari halaman 1

“J a d i k a m i m e m i n t a Mendikdasmen dan seluruh jajaran untuk mensosialisasikan SE ini. Diperjelas bahasa non-ASN-nya ini, apakah P3K yang masuk ke dalam ASN itu juga harus dicabut kedudukannya atau hanya PPPK paruh waktu. Jadi kategorinya harus jelas,” ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi terkait penyebutan guru non ASN.

“Kenapa hari ini masyarakat dan terutama guru-guru kita bingung? Karena ada penyebutan bahasa non-ASN. Artinya, ketika hari ini mereka statusnya P3K paruh waktu, maka ketika ada penyebutan non-ASN ini, maka mereka tidak dianggap lagi. Nah, nasibnya seperti apa?,” lanjutnya.

Politikus PKB ini mengatakan Komisi X DPR RI akan melakukan pengawasan terhadap transisi ini, dari PPPK paruh waktu menjadi non-ASN.

“Kami ingin memastikan

Adhan Tolak Godaan Uang Ratusan Juta

dari halaman 1

“Ada yang datang bawa uang ratusan juta, tapi tetap saya tolak. Prinsip saya jelas,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa sikap pemerintah kota terhadap miras tidak akan berubah meski mendapat

tekanan maupun godaan materi. Selain itu, Adhan turut mengajak masyarakat ikut berperan aktif menjaga lingkungan dengan melaporkan jika menemukan aktivitas penjualan minuman keras di wilayah masing-masing.

“Kalau ada yang jual, laporkan.

Life Wife

dari halaman 1

Yang dari Islam akan dibawakan oleh ustad Jaya dari masjid Al Hikmah New York.

Selama ini James sering ikut ke gereja Katolik dan Lia sering ikut ke gereja Kristen. Erick, anaknya, sering juga ke gereja bapaknya tapi selalu lupa: di akhir doa ia menggerakkan tangan ke tiga arah sebagaimana praktik doa di Katolik.

Yang akan ditunggu pelayat adalah eulogy. Saya sering mendengarkan eulogy tokoh-tokoh Amerika ketika mereka menghadiri pemakaman sahabat.

Isi eulogy itu biasanya sangat menarik: penilaian dari si pembawa eulogy mengenai tokoh yang akan dimakamkan. Dalam pidato itu begitu sering sisi-sisi lucu almarhum disebutkan. Maka di acara pemakaman seperti itu sangat biasa terdengar tawa yang meriah dan tepuk tangan yang riuh.

Salah satu yang saya suka adalah eulogy yang disampaikan Presiden Bill Clinton di hari pemakaman petinju Mohamad Ali. Itu tahun 2016. Di Louisville. Saya sedang di sana saat itu. Lucu sekali.

Kadang, di satu pemakaman, yang memberikan eulogy sampai lima orang. Tapi karena menarik semua, tidak sampai membosankan. Di acara Mohamad Ali itu yang membawakan eulogy empat orang. Yang tidak lucu hanya satu: Imam

Zaid Zakir. Isinya lebih banyak khotbah tentang Islam.

Di pemakaman James F. Sundah pagi ini yang membacakan eulogy satu orang: Lia, istrinya. Lia sendiri yang menuliskannya. Itu tidak sulit bagi Lia yang pianis, aktivis, dan pengacara di New York. Yang sulit bagi Lia adalah bagaimana bisa menahan tangis di tengah eulogy itu. “Saya harus latihan membaca sambil menahan tangis,” ujar Lia tadi malam.

Lia sudah menyelesaikan naskah eulogy untuk James itu tapi masih dia pikir lagi apakah ada yang kurang. Kalau pun nanti Lia tidak kuat menahan tangis sudah disiapkan Erick yang bisa meneruskannya.

Pasti Lia juga akan menguraikan segala aspek kehidupan James yang bukan hanya musisi, tapi juga orang yang punya prinsip: di musik tidak boleh hanya memikirkan aspek bisnis. Soal keterbukaan, keadilan, dan fairness harus dijunjung tinggi.

Mengapa pelayat yang menghadiri pemakaman James dianjurkan pakai baju berwarna ungu, merah, biru, atau oranye? Mengapa mereka diharapkan tidak pakai “baju duka” hitam putih?

“Itu warna-warna kesukaan James,” ujar Lia. Terutama warna ungu.

Lia sendiri akan pakai baju apa?

“Saya pakai baju yang dibelikan James terakhir,” ujar Lia.

Baju itu dibeli James untuk ulang

tahun Lia. Tahun lalu. Yakni sehari setelah James kali pertama menjalani kemo untuk kanker parunya.

Baju itu buatan Carmanita. Anda sudah tahu siapa Carmanita: desainer baju dan pembatik. Dia cucu pencipta lagu yang Anda pasti suka ketika Anda masih anak-anak dulu: Ibu Soed.

Sedang para staf Lia di kantor pengacarany sudah siap semua: berseragam warna ungu.

Sebenarnya saya ingin melihat Lia main piano saat pelayat menyanyikan Lilin Lilin Kecil. Tapi saya tidak pernah melihat ada piano di rumah mereka. Selama di New York saya juga tidak pernah mendengar Lia bicara soal piano.

Padahal Lia sampai belajar piano di sekolah musik Berklee, di Boston. Sejak sekolah di Santa Ursula Jakarta pun bakat piano Lia sangat menonjol. Kalau toh ada yang sedikit “mengecewakan” James adalah: Lia terlalu fokus ke lagu lagu klasik.

James sebagai guru musik di Santa Ursula pernah minta agar Lia mencoba lagu lain selain klasik. Harapan James, Lia akan memainkan lagu pop. Ternyata Lia memainkan jazz. “Padahal beralih dari klasik ke jazz itu lebih sulit,” ujar James saat saya di rumahnya kala itu.

Musik telah menyatukan James dan Lia. Saya melihat sendiri kehidupan suami-istri itu. Mesra setiap hari. Itu sesuai dengan motto Lia: happy life, happy wife. (*)

Presiden Prabowo Subianto meninjau pelabuhan shelter sortir dan pengepakan ikan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5).

KNMP Wujudkan Ekosistem Perikanan Modern

Prabowo Sebut Kehidupan Nelayan Harus Tambah Baik

GORONTALO - GP - Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto akhir pekan lalu, di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, menandai langkah nyata pemerintah menghadirkan ekosistem perikanan yang tidak hanya memperkuat produktivitas nelayan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah hasil laut melalui dukungan infrastruktur dan fasilitas terpadu di kawasan pesisir yang dikelola melalui Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Presiden meninjau sejumlah fasilitas yang disiapkan di atas

lahan seluas 3.895 meter persegi untuk mendukung aktivitas para nelayan dan rantai distribusi hasil perikanan dari hulu hingga hilir. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan nelayan melalui penyediaan fasilitas penunjang yang terintegrasi.

Kepala Negara menilai berbagai sarana yang telah dibangun, mulai dari pabrik es hingga gudang pendingin, menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas dan nilai hasil tangkapan nelayan. "Ini memang niat kita untuk memberdayakan semua nelayan di Indonesia.

Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupan tambah

baik. Penghasilannya harus tambah karena para nelayan punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa kita,” ujar Kepala Negara di depan ratusan nelayan.

Kawasan ini memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar dengan komoditas utama berupa ikan selar, cakalang, dan tuna yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat sekaligus komoditas unggulan perikanan Kota Gorontalo.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Leato Selatan menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat di akar rumput, termasuk para nelayan yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional. (tro)

30 Ribu Gedung KDMP Segera Diresmikan

Salah satu gedung Koperasi Desa Merah Putih yang selesai dibangun.

JAKARTA - Kementerian Koperasi (Kemenkop) berencana untuk meresmikan sekitar 30.000 bangunan gedung koperasi merah putih yang sudah siap untuk beroperasi dalam waktu dekat pada tahun ini. Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Riza Azmi, menjelaskan ada beberapa tahapan atau fase dalam program koperasi merah putih. "Untuk yang fase satu sudah dilewati ya, yaitu fase kelembagaan. Sudah terbentuk sekitar 80.000 lebih (koperasi merah putih, red.) dari sisi kelembagaan, dari sisi badan hukum dan seterusnya," katanya, dikutip dari Antara, Ahad (10/5).

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara pada Workshop Media “Cerita Koperasi Desa Jadi Berita Bermakna” yang digelar Direktorat Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital. “Sekarang kita masuk ke fase kedua ya, fase pembangunan dan fase operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” katanya.

setidaknya 7.000 bangunan koperasi merah putih yang 100 persennya siap beroperasi. Ia mengatakan bahwa operasional koperasi merah putih itu akan disusul dengan peresmian sekitar 30.000 gedung koperasi merah putih yang siap beroperasi di kisaran Juli-Agustus 2026.

Menurut dia, tantangan yang

dihadapi koperasi merah putih sekarang ini adalah pemerataan akses, misalnya terkait jaringan listrik dan internet. "Yang kedua sebenarnya dari sisi digitalisasi, terkait dengan indeks Masyarakat Digital (IMDI) yang sebenarnya itu masih belum seragam," katanya.

Ada beberapa daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat literasi digitalnya tinggi, tapi di daerah-daerah lain mungkin masih perlu pembinaan. Kalau untuk lahan, kata dia, memang ada tantangan untuk mencari lahan seluas minimal 1.000 meter persegi untuk bangunan berukuran 20x30 meter. Ia mengatakan bahwa skema tersebut menggunakan desain pertama, tetapi ada desain kedua untuk alternatif, yakni lahan-lahan di bawah 1.000 meter persegi. "Nanti ada sebenarnya ada desain kedua yang sebenarnya untuk lahan-lahan yang di bawah 1.000 m persegi. Cuma ini lagi masih baru disiapkan," katanya. (jp)

LOWONGAN PEKERJAAN



PT. DUA JAYA BERSAUDARA (GROUP)

Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi energi, khususnya Agen B3M Gas, LPG subsidi 4 kg, dan SP3U, membuka kesempatan bagi Anda yang berkemampuan untuk bergabung bersama kami.

DRIVER

RINGKASAN PEKERJAAN :
 Driver bertugas melaksanakan proses distribusi tabung LPG dan Bright Gas dari gudang ke pelanggan sesuai rute yang ditentukan. Pekerjaan meliputi mengemudi kendaraan operasional membantu proses muat dan bongkar, memastikan keamanan serta kelayakan kendaraan dan muatan, serta mematuhi prosedur keselamatan kerja. Posisi ini membutuhkan fisik yang kuat, disiplin, dan kemampuan bekerja sama untuk memastikan pengiriman tepat waktu, aman, dan sesuai standar perusahaan.

KUALIFIKASI :

- Pria berusia maksimal 45 tahun
- Memiliki SIM B 1 Umum atau B 1 Umum Aktif
- Sehat Jasmani & Rohani
- Pendidikan Minimal SMA/SMK
- Pribadi yang jujur, rajin dan bertanggungjawab
- Mampu bekerjasama dalam tim

TUGAS & TANGGUNGJAWAB :

- Melakukan proses distribusi sesuai dengan jadwal dan rute yang telah ditentukan
- Mengemudi mobil sesuai dengan standart perusahaan
- Menghitung dan menurunkan tabung LPG sesuai dengan jumlah yang tertulis di keas anjuran dan sesuai dengan permintaan pelanggan
- Melakukan proses dokumentasi saat penyaluran ke pelanggan
- Melakukan efisiensi penggunaan B3M
- Menjaga dan memelihara mobil yang dibawa serta melakukan pemeliharaan rutin
- Menjaga waktu ide kendaraan sesuai dengan standart perusahaan

Kirimkan CV dan lamaran ke :
 Email: djbrekrutmen@yahoo.com
 Subject: Driver - (Nama Anda)

Atau kirim langsung ke :
 Kantor LCG-Bright Gas PT. Dua Jaya Bersaudara, Sinar Berkas Abadi -
 Petak Timur Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo

Informasi Selengkapnya 0823-9549-0147

Purbaya Pastikan Tak Ada Tax Amnesty

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menerapkan tax amnesty atau pengampunan pajak selama periode kepemimpinannya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia memastikan, kebijakan Tax Amnesty baru akan diberlakukan jika sudah ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto. “Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Purbaya dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Bendahara Negara ini juga menjelaskan Indonesia sejauh ini telah dua kali melaksanakan program tax amnesty, yakni pada 2016 dan 2022. Karena itu, pemerintah dinilai tidak perlu kembali membuka program serupa. Menurut Purbaya, peserta tax amnesty yang telah memenuhi kewajibannya juga tidak perlu merasa khawatir.

Pemerintah, kata dia, hanya akan mengejar wajib pajak yang sebelumnya telah menyatakan komitmen pembayaran tetapi belum melunasnya. "Kalau menurut saya sih sudah clear, kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah, kalau nggak penting-penting amat nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji mau bayar sekian tapi belum bayar itu yang dikejar," jelasnya.

Lebih jauh, Purbaya memastikan bahwa pemerintah ingin menjaga stabilitas iklim usaha di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kebijakan perpajakan.

Dalam hal ini, lanjut dia Kementerian Keuangan memastikan reformasi perpajakan tetap diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan wajib pajak. "Kementerian Keuangan berkomitmen untuk selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik," bebenya.

Dalam kesempatan ini, Purbaya juga memberi klarifikasi soal pemeriksaan ulang peserta PPS atau Tax Amnesty Jilid II. Ia menegaskan tidak akan melakukan audit ulang terhadap seluruh peserta program tersebut. Menurut dia, yang akan diperiksa hanyalah realisasi komitmen peserta terkait dengan repatriasi dana atau pemulangan aset dari luar negeri ke Indonesia. Purbaya meminta pengusaha tidak panik karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan memeriksa kembali seluruh peserta wajib pajak peserta tax amnesty. "Kita akan perluas tax base, (tapi) bukan itu caranya meningkatkan pendapatan pajak. Jadi, kita tidak akan berburu di kebun binatang," tukasnya. (jp)



**PENGUMUMAN LELANG TERAKHIR
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**



Menunjuk Pengumuman Lelang terakhir yang dimuat pada Hari Kamis Tanggal 26 Maret 2026 melalui Surat Kabar Harian Gorontalo Post, Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Limboto melalui perantara Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo akan melakukan Lelang Uang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui e-Auction terhadap :

No	Objek Lelang	
1.	CV. MARINA MITRA UTAMA (DIREKTUR : NINNO MAKALAU) 1 (satu) bidang tanah seluas 468 M2, berikut bangunan toko dan segala sesuatu yang melekat di atasnya terletak di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Sebagaimana tertuang dalam SHM No. 124/Katialada tanggal 23 Maret 2017 tercatat an. Mohammad Arivaldy Piola (Nilai Limit Rp. 425.000.000,- Uang Jaminan Rp. 85.000.000,-)	

PELAKSANAAN LELANG :

Cara Penawaran	Open Bidding
Hari / Tanggal	Selasa, 19 Mei 2026
Batas Akhir Penawaran	Selasa, 19 Mei 2026, Pukul 10.00 WITA atau Pukul 09.00 WIB (sesuai waktu server)
Waktu Penawaran	Sejak tayang di lelang.go.id sampai dengan batas akhir penawaran
Alamat Domain	lelang.go.id
Tempat Pelaksanaan Lelang	KPKNL Gorontalo, Jalan Achmad Nadjamuddin No. 07, Kota Gorontalo
Penetapan pemenang Lelang	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan harga lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea lelang pembeli	2% dari harga lelang

PERSYARATAN LELANG :

- Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id>.
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

Keterangan :

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan
- Calon peserta lelang/peminat agar mengantisipasi keterlambatan **penerimaan** uang jaminan lelang pada rekening penampungan KPKNL Gorontalo akibat mekanisme transfer perbankan (End of Day) yang dapat mengakibatkan kegagalan menjadi peserta lelang. Untuk menghindari keterlambatan **penerimaan** uang jaminan lelang, calon peserta lelang/peminat dapat menyertokan uang jaminan lelang lebih awal dan menghindari batas akhir waktu penyetoran.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59 WIB)
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan lelang, misal : bea lelang, BPHTB, dan denda-denda (PBB, Tagihan Listrik, Air, dll), PPN sebesar 1,1% yang dipungut sesuai ketentuan perundang-undangan menjadi tanggung jawab pembeli.
- Pada saat mengikuti lelang dan melakukan penawaran dalam lelang ini, peserta lelang dianggap telah sungguh-sunggu mengetahui objek yang ditawarkan. Apabila terdapat kekurangan / kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembeli disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
- Apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang, pemenang lelang wajib melakukan pelunasan lelang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah waktu pelaksanaan lelang, apabila pemenang tidak melakukan pelunasan maka akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas negara.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Limboto atau KPKNL Gorontalo, Jl. Achmad Nadjamudin No.7 Kota Gorontalo Telp. 0435 – 2010012.

PERINGATAN:
Kepada para debitur dan pemilik jaminan, pembayaran hanya dapat dilakukan melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Limboto Jalan Achmad.A.Wahab No. 269 Limboto, Telp. 0435 823727 / 081356622254 (Syahrul)

Limboto, 12 Mei 2026
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG LIMBOTO

TTD

Budi Widiatmoko
Pgs BOH

Rp 1,2 Triliun Siap Mengucur ke Gorontalo



Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri KKP dan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat meninjau lokasi Tambatan Perahu Olalo.

Deprov Minta Kominfotik Tambah Anggaran KPID-KIP

GORONTALO - DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo meminta Dinas Komunikasi Informatikan dan Statistik (Diskominfotik) untuk menambah anggaran pada dua lembaga negara yang menjadi mitra Diskominfotik, yakni Komisi Informasi Provinsi (KIP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo. Dua lembaga bentukan undang-undang itu disebut tidak layak hanya menerima anggaran operasional Rp100 jutaan per tahun. Hal ini disampaikan pada rapat kerja Komisi I DPRD dengan Dinas Kominfo dan Statistik, Senin (11/5/2026)

Komisi I meyakini kehadiran Mohamad Trizal Entengo sebagai Kadis Kominfotik bisa lebih terbuka dan komunikatif dengan semua pihak. Masalah keterbatasan anggaran bisa dikomunikasikan agar eksistensi KPID dan KIP bisa berjalan baik.

“Insyaallah di masa pak kadis bisa



Komis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), KIP, dan Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo hadir pada rapat kerja Komisi I DPRD dengan Dinas Kominfo dan Statistik, Senin (11/5).

mencarikan solusi. KIP dan KPID dari tahun tahun kemarin agak dipersulit biasanya dijual ke kota maupun ke tempat pelelangan ikan. Untuk jenis ikan oci, harga jualnya berkisar Rp25 ribu per kilogram. Selain menghadapi hasil tangkapan yang tidak tetap, nelayan juga harus mengeluarkan biaya operasional saat melaut, mulai dari bahan bakar hingga kebutuhan konsumsi selama berada di laut. “Pengeluaran terbesar itu solar, rokok, sama cemilan,” ujar Adrianto bercanda.



Perahu nelayan terparkir di bibir pantai Molotabu, para nelayan berharap mendapat bantuan untuk menopang aktivitas melaut mereka.

tidak bisa dipastikan karena keadaan laut sering berubah. “Rezeki itu Tuhan yang atur. Tidak menentu,” katanya sambil tertawa. Ikan hasil tangkapan biasanya dijual ke kota maupun ke tempat pelelangan ikan. Untuk jenis ikan oci, harga jualnya berkisar Rp25 ribu per kilogram. Selain menghadapi hasil tangkapan yang tidak tetap, nelayan juga harus mengeluarkan biaya operasional saat melaut, mulai dari bahan bakar hingga kebutuhan konsumsi selama berada di laut. “Pengeluaran terbesar itu solar, rokok, sama cemilan,” ujar Adrianto bercanda.

Walaupun hidup bergantung pada laut, Adrianto mengaku bersyukur hasil melaut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anaknya. “Alhamdulillah cukup, yang penting rajin,” tambahnya. Di sisi lain, nelayan sekaligus warga sekitar, Ugen mengungkapkan keresahan masyarakat pesisir terkait minimnya perhatian pemerintah terhadap nelayan.

Menurutnya, bantuan yang diberikan selama ini sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan. “Kami berharap bantuan seperti perahu dan mesin. Kadang bantuan tidak tepat sasaran, nelayan malah dapat bantuan sapi,” ujarnya.

anggaran KPID dan KIP bisa didorong melalui mekanisme dewan.” Kalau bisa Pak Ketua, rapat hari ini kita bikin kan notulensi.

Kita menyurat ke pimpinan dewan untuk bisa dibahas di Badan Anggaran,” kata Ramdan. Di tempat yang sama, Kadis Kominfotik Trizal Entengo menyambut baik rapat perdananya bersama Komisi I. Sebagai penjabat yang baru empat hari dilantik, ia berjanji akan mengidentifikasi semua masalah dan mencarikan upaya terbaik bagi semua pihak. “Saya baru sekitar empat hari jadi kadis pak, tapi saya sudah saya coba inventarisir semua masalah untuk dicarikan solusinya. Saya syukuri adalah Komisi I sangat mendukung agar KPID dan KIP ini bisa semakin baik ke depan,” jelas Trizal.

Rapat Komisi I dengan Dinas Kominfotik menghadirkan Komisioner KPID dan KIP. (tro)

Berkah Kunjungan Presiden, 62 Lokasi KNMP Segera Dibangun

GORONTALO - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Gorontalo membawa berkah tersendiri. Peninjauan orang nomor 1 di Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5) lalu, membuka kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk membangun sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berkah yang dimaksud yakni Menteri KKP menyetujui 62 lokasi baru untuk pembangunan KMNP di Gorontalo untuk ditindaklanjuti. Anggaran pembangunan ditaksir sekitar Rp1,24 triliun itu akan menyulap desa-desa nelayan menjadi mandiri dan modern.

Keberhasilan mendatangkan Presiden Prabowo dan mengamankan anggaran fantastis tidak lepas dari peran Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Setelah sukses memperoleh anggaran raksasa untuk proyek hilirisasi ternak, Gusnar berhasil meyakinkan Menteri

KKP terkait keselarasan program unggulannya agromaritim dengan proyek nasional KNMP. Menteri KKP berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan KNMP di Gorontalo. “Ini adalah apresiasi atas kerja keras kita semua. Program Agromaritim bukan hanya tentang menanam atau menangkap ikan, tapi tentang membangun ekonomi pesisir berbasis ekosistem,” ujar Gubernur Gusnar di sela-sela mendampingi Presiden, seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Gorontalo.

Gusnar telah menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk segera berkoordinasi lanjut dengan Kabupaten/Kota mempersiapkan dan melengkapi administrasi. Termasuk lokasi serta segera membawa kelengkapan berkas untuk ditindaklanjuti oleh KKP. “Ini adalah kesempatan emas yang akan kami jemput sama-sama, baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota. Saya mengajak mari kita bergandeng tangan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran besar ini untuk kepentingan nelayan,” tandasnya. (tro)



PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN



Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Limboto melalui perantara Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui e-Auction terhadap:

No	Objek Lelang
1.	<div>SUDIRMAN A. RASYID a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 97 M², berikut bangunan Toko dan segala sesuatu yang melekat di atasnya terletak di Desa Pilolalenga, Kecamatan Dungaliayo (Dahulu Kecamatan Batudaa), Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam SHM No. 144/Pilolalenga tercatat an. Sudirman A. Rasyid (Nilai Limit Rp. 800.000.000,- Uang Jaminan Rp. 160.000.000,-)</div> <div></div>
	<div>b. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan seluas 718 M², berikut Bangunan Rumah Tinggal dan segala sesuatu yang melekat di atasnya terletak di Desa Pangadaa, Kecamatan Dungaliayo (Dahulu Kecamatan Batudaa), Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam SHM No. 137/ Pangadaa tercatat an. Sudirman A. Rasyid (Nilai Limit Rp. 342.000.000,- Uang Jaminan Rp. 68.400.000,-)</div> <div></div>

Batas Akhir Penawaran
Selasa, 26 Mei 2026 Pukul 11.00 WITA atau Pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server).

PELAKSANAAN LELANG :

Cara Penawaran	Open Bidding (dengan mengakses url https://www.lelang.go.id)
Hari / Tanggal	Selasa, 26 Mei 2026
Batas Akhir Penawaran	Sesuai yang tercantum pada Objek Lelang diatas
Waktu Penawaran	Sejak tayang di lelang.go.id sampai dengan batas akhir penawaran
Alamat Domain	lelang.go.id
Tempat Pelaksanaan Lelang	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Gorontalo Jalan Achmad Nadjamudin Nomor 7 Kota Gorontalo Ruang Lelang
Penetapan pemenang	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan harga lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea lelang pembeli	2% dari harga lelang
PPN Pembeli	1.1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening ke Rekening Penjual (BRI) pada saat penyerahan sertifikat asli

PERSYARATAN LELANG :

- Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id>.
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

Keterangan :

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan jaminan yang dipersyaratkan
- Calon peserta lelang/peminat agar mengantisipasi keterlambatan **penerimaan** uang jaminan lelang pada rekening penampung KPKNL Gorontalo akibat mekanisme transfer perbankan (End of Day) yang dapat mengakibatkan kegagalan menjadi peserta lelang. Untuk menghindari keterlambatan **penerimaan** uang jaminan lelang, calon peserta lelang/peminat dapat menyetorkan uang jaminan lelang lebih awal dan menghindari batas akhir waktu penyetoran, dan unggah/mengupload bukti setor tersebut pada aplikasi lelang
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (pukul 23.59 WIB)
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan lelang ini, misal : bea lelang pembeli, BPHTB, dan denda-denda (PBB, Tagihan Listrik, Air, dll), PPN sebesar 1,1% yang dipungut sesuai ketentuan perundang-undangan, menjadi tanggung jawab pembeli
- Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
- Peserta lelang atau Pembeli dianggap dengan sungguh-sungguh mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya atas segala bentuk kekurangan / kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul dikemudian hari baik dari aspek fisik maupun yuridis / legal, dan tidak berhak untuk menolak dan menarik diri kembali setelah pembeli disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga
- Apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang, pemenang lelang wajib melakukan pelunasan lelang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah waktu pelaksanaan lelang, apabila pemenang tidak melakukan pelunasan maka akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas negara.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. BRI (Persero) Tbk. Branch Office Limboto atau KPKNL Gorontalo, Jl. Achmad Nadjamudin No.7 Kota Gorontalo Telp. 0435 – 2010012

PERINGATAN:
Kepada para debitur dan pemilik jaminan, pembayaran hanya dapat dilakukan melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Limboto Jalan Achmad.A.Wahab No. 269 Limboto, Telp. 0435 823727
CP : 085240293179

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. BRANCH OFFICE LIMBOTO

Ttd

Budi Widiatmoko
Pgs BOH

Kabgor Nyata Lindungi Pekerja

Klaim BPJS Rp36,9 Miliar

LIMBOTO-GP-Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan perlindungan sosial yang nyata bagi masyarakat pekerja. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, realisasi pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan di daerah ini mencapai Rp36,9 miliar.

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi menegaskan, capaian ini menjadi momentum penting untuk memperluas kepesertaan melalui program Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah lebih dahulu mencapai Universal Health Coverage (UHC) untuk BPJS Kesehatan kategori utama. Ke depan, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan perlindungan di sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari visi besar daerah yang tertuang dalam RPJMD bersama Wakil Bupati Tony S. Junus.

"Kami ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja rentan seperti petani dan nelayan, mendapatkan perlindungan yang layak. Semakin luas cakupan kepesertaan, maka semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat," ujar Sofyan.

Ia menambahkan, perlindungan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar bantuan, melainkan bentuk kehadiran pemerintah dalam

memberikan kepastian, rasa aman dan harapan bagi para pekerja.

"Ini adalah pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah," tambahnya. Pemkab Gorontalo pun menargetkan percepatan cakupan UCJ pada tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Sanco Simanullang, di hadapan Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo mengaku, besarnya nilai klaim yang terealisasi menjadi bukti konkret bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Klaim tersebut mencakup berbagai skema perlindungan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, beasiswa pendidikan hingga Jaminan Hari Tua dan pensiun.

"Ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko sosial dan ekonomi," pungkasnya. **(Wie)**



MELEPAS. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi bersama Ketua TP PKK Maryam Sofyan Puhi, Ketua DPRD Zulfikar Usira dan Kapolres Gorontalo saat bersalaman melepas JCH

Bupati Minta JCH Doakan Daerah

161 Jamaah Dapat Uang Saku

LIMBOTO-GP-Bupati Gorontalo Sofyan Puhi meminta agar jamaah calon haji (JCH) untuk mendoakan daerah Kabupaten Gorontalo, baik itu masyarakatnya dan pemerintahannya.

"Tolong doakan daerah ini, doakan masyarakat dan pemerintahannya. Kami percaya doa di Tanah Suci adalah doa-doa terbaik," ucap Bupati Gorontalo Sofyan Puhi dengan suara bergetar, saat pelepasan JCH di masjid Baiturahman Limboto, senin subuh tadi (11/5/2026).

Ia juga berpesan, agar seluruh jamaah menjaga kesehatan, kekompakan, dan saling membantu selama perjalanan ibadah haji. Keberangkatan haji sebagai

momentum spiritual yang tidak semua orang mendapat kesempatan menjalaninya.

"Dari ratusan ribu penduduk Kabupaten Gorontalo, hanya 161 orang yang mendapat panggilan Allah tahun ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa," kata Sofyan.

Ia mengatakan, para jamaah bukan hanya menjalankan ibadah haji secara pribadi, tetapi juga membawa doa dan harapan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Seluruh jamaah sebelumnya telah mengikuti manasik haji sebagai bekal menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

"Tata cara dan aturan ibadah sudah dibekali melalui manasik. Tinggal bagaimana dijalankan dengan baik agar ibadah hajinya sempurna," ujar Bupati Sofyan.

Pemerintah daerah, kata dia, juga

memberikan bantuan uang saku bagi jemaah untuk membantu kebutuhan selama menjalankan ibadah. Dalam kesempatan itu, Sofyan turut meminta petugas pendamping haji memberi perhatian penuh kepada para jemaah asal Kabupaten Gorontalo selama berada di Mekkah dan Madinah.

Usai memasuki Mess Haji Gorontalo, para jemaah dijadwalkan bertolak ke Makassar sebelum melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi.

Pelepasan turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Maryam Sofyan Puhi, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Kapolres Gorontalo, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Lantunan talbiyah "Labbaikallahumma Labbaik" menggema di dalam masjid saat para jemaah bersiap menuju embarkasi haji. **(Wie)**



KLAIM. Bupati Gorontalo bersama Kepala BPJS saat memperlihatkan bukti klaim yang dibayarkan pemerintah ke BPJS selama tahun 2025

OTOMOTIF

HONDA MAYESTRO

Sepanjang Mei Honda Ekstra Promo

GORONTALO - GP - Di tengah aktivitas yang makin padat dan kebutuhan mobilitas yang terus meningkat, punya kendaraan yang nyaman sekaligus terjangkau jadi salah satu kebutuhan utama masyarakat saat ini. Melihat hal tersebut, Torang Honda menghadirkan program spesial bertajuk Honda MAYestro (Makin Yakin dengan Ekstra Promo) sepanjang Mei 2026.

Lewat program ini, masyarakat Gorontalo bisa menikmati berbagai penawaran menarik untuk memiliki sepeda motor Honda impian dengan cara yang lebih ringan dan hemat. Mulai dari uang muka 10%, potongan angsuran hingga Rp100 ribu, sampai cashback jutaan rupiah untuk berbagai tipe sepeda motor Honda favorit.

Untuk menunjang mobilitas sehari-hari, Honda

BeAT Sporty dan Honda BeAT Street hadir sebagai pilihan motor praktis dan irit, sementara Honda Genio menawarkan desain stylish yang cocok untuk anak muda maupun pekerja aktif, dengan cashback hingga Rp1 juta.

Bagi yang ingin tampil lebih fashionable di jalan, Honda Stylo 160 hadir dengan cashback Rp300 ribu. Sedangkan Honda Vario 125 menawarkan cashback Rp700 ribu dan Vario 125 Street dengan cashback Rp1,2 juta. Untuk pengendara yang menyukai performa lebih bertenaga dan fitur modern, Honda Vario 160 juga tersedia dengan keuntungan hingga Rp1,2 juta.

Nuansa gaya hidup juga terasa lewat Honda Scoopy yang tetap menjadi salah satu pilihan favorit berkat desain ikoniknya. Pada program kali ini, Honda Scoopy hadir dengan cashback hingga



EKSTRA PROMO - Dapatkan kemudahan memiliki sepeda motor Honda kesayangan anda melalui Program Honda MAYestro yang berlangsung sepanjang Mei 2026 di seluruh dealer resmi Honda di Gorontalo.

Rp700 ribu.

Sementara untuk konsumen yang mengutamakan kenyamanan berkendara premium, Honda ADV160 dan Honda PCX160 hadir dengan cashback hingga Rp1,5 juta. Cocok untuk mobilitas harian

maupun perjalanan jarak jauh yang lebih nyaman.

Pada segmen motor cub, Honda tetap menghadirkan pilihan tangguh dan efisien melalui Honda Revodan Supra GTR 150 dengan cashback Rp500 ribu, sedangkan Honda

Supra 125 dengan cashback Rp400 ribu. Bagi pecinta motor sport, berbagai model Honda juga mendapatkan penawaran spesial. Honda CRF150L dengan cashback Rp800 ribu dan CBR150R cashback hingga Rp1,5 juta, untuk Honda CB150R dengan cashback Rp500 ribu, sedangkan Honda CBR250RR dengan cashback hingga Rp2 juta. Selain promo pembelian, Honda juga memastikan pengalaman berkendara konsumen tetap nyaman lewat dukungan jaringan bengkel resmi AHASS yang tersebar luas di Gorontalo. Kehadiran layanan purna jual ini memudahkan konsumen dalam melakukan perawatan kendaraan secara lebih praktis dan aman.

"Sekarang masyarakat bukan cuma mencari kendaraan, tapi juga mencari kemudahan dan value lebih saat membeli.

Lewat Honda MAYestro, kami ingin memberikan pengalaman memiliki motor Honda yang lebih ringan, lebih nyaman, dan tentunya lebih menguntungkan," ujar Panji Sapta Pratama, Sales Department Head PT Daya Adicipta Wisesa.

Program Honda MAYestro berlangsung sepanjang Mei 2026 di seluruh dealer resmi Honda di Gorontalo. Dengan berbagai pilihan promo dan tipe kendaraan yang tersedia, masyarakat bisa menyesuaikan motor impian sesuai kebutuhan, gaya hidup, hingga aktivitas sehari-hari.

Informasi lebih lanjut mengenai promo, produk, hingga aktivitas terbaru Honda juga dapat diikuti melalui media sosial resmi Torang Honda di Instagram @toranghonda, Facebook Torang Honda, dan TikTok @toranghonda. **(tro)**

Penanganan Gepeng Dinilai Belum Maksimal

Pemkot Didorong Perketat Pengawasan Jalanan dan Rutin Lakukan Razia

GORONTALO-GP- Penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Gorontalo dinilai belum maksimal. Aktivitas mereka yang kian marak di sejumlah titik menunjukkan lemahnya pengawasan serta belum konsistennya langkah penertiban yang dilakukan.

Untuk itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Supriadi Lameo mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, untuk segera mengambil langkah konkret, terutama dengan memperketat pengawasan di jalanan serta melakukan razia secara rutin.

“Kami sudah menyarankan agar ada tindakan konkret, seperti razia dan mengakomodir para gelandangan melalui pembinaan,” ujarnya.

Menurutnya, pembinaan

harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh akar persoalan. Tidak hanya penertiban sementara, tetapi juga perlu diikuti dengan edukasi, pelatihan keterampilan, hingga pemberian modal usaha agar para gepeng memiliki alternatif penghasilan.

“Tujuannya agar mereka bisa meningkatkan tarafhidup dan tidak lagi bergantung pada aktivitas meminta-minta di jalanan,” jelasnya.

Legislator Partai Gerindra itu juga menyoroti masih adanya pembiaran yang



Supriadi Lameo

membuat para pengemis kembali beraktivitas di jalan

meski pernah dibina. Karena itu, ia menekankan pentingnya penindakan yang konsisten.

“Kalau perlu dilakukan setiap hari. Dengan penindakan yang konsisten, mereka akan jera,” tegasnya.

Selain itu, Supriadi turut mengingatkan adanya dugaan eksploitasi anak dalam praktik mengemis. Ia mengaku masih menemukan anak-anak dibawa hingga larut malam, bahkan dalam kondisi cuaca buruk.

“Ini sudah masuk ranah eksploitasi anak. Saya pernah melihat langsung ibu-ibu

menggendong anak saat hujan, bahkan sampai pukul 01.00 dini hari masih di pinggir jalan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemkot harus tetap bertindak tegas, termasuk terhadap pengemis yang berasal dari luar daerah. Namun, langkah tersebut harus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, seperti Satpol PP dan dinas sosial. Pasalnya, tanpa pengawasan ketat dan razia yang dilakukan secara rutin, persoalan gepeng di Kota Gorontalo akan terus berulang dan sulit dituntaskan. (Adv)



Dokumentasi rapat Bapemperda Dekot di Aula III.

(F. ISTIMEWA)

Penanganan Sampah di Wongkaditi Timur Beralih ke Sistem Terpadu

GORONTALO-GP- Penanganan sampah di Kota Gorontalo mulai diarahkan pada sistem terpusat guna menekan praktik pembuangan liar yang masih kerap terjadi di sejumlah titik.

Hal ini terlihat dari pengelolaan sampah di TPS 3R Wongkaditi Timur yang mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satu perubahan yang mencolok yakni penyatuan armada getor yang sebelumnya tersebar di berbagai titik kini dipusatkan dalam satu lokasi.

“Sekarang armada sudah



Syafruddin Junaidi

terpusat. Semua sampah diarahkan masuk ke lokasi ini,” ujar Syafruddin Junaidi.

Ia menjelaskan, konsep

TPS 3R tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan, tetapi juga menjadi pusat pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Sampah yang masuk akan dipilah, diolah, hingga didaur ulang untuk kemudian dimanfaatkan kembali.

Menurutnya, sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang dibuang sembarangan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.

“Sistem ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang dibuang

sembarangan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata,” tambahnya.

Selain berdampak pada lingkungan, keberadaan TPS 3R juga dinilai memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Proses pengolahan sampah membuka peluang pendapatan bagi para pekerja melalui hasil daur ulang yang memiliki nilai jual.

Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pengelolaan sampah yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Gorontalo. (Adv)

Susanto Komitmen Dukung Penguatan Gerakan Pramuka

GORONTALO-GP- Upaya penguatan Gerakan Pramuka di Kota Gorontalo terus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Susanto Liputo.

Menurut Susanto, keberadaan Majelis Pembimbing Cabang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program yang dijalankan oleh Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka. Tugas tersebut, kata dia, telah diatur secara jelas dalam undang-undang Gerakan Pramuka.

Ia menjelaskan, unsur pemerintah daerah, legislatif, serta Mabicab memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan kegiatan kepramukaan dapat berjalan optimal sebagai wadah pembinaan generasi muda.

“Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawal dan mendukung program-program yang dilaksanakan Kwarcab. Hal ini sudah diamanatkan dalam undang-undang Gerakan Pramuka, sehingga semua unsur di Mabicab harus berperan aktif,” ujar Susanto.

Lebih lanjut, Susanto juga menyoroti agenda kegiatan kepramukaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Salah satu fokus utama tahun ini adalah persiapan menuju kegiatan Jambore di Bumi Perkemahan Cibubur.

Ia mengungkapkan,



Susanto Liputo

sebelumnya Gorontalo telah sukses melaksanakan kegiatan nasional Perkemahan Antar Satuan Karya (Peransaka). Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus mengembangkan kegiatan kepramukaan di daerah.

“Setelah sukses menjadi tuan rumah kegiatan nasional Peransaka, tahun ini kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan Jambore di Cibubur,” jelasnya. Susanto memastikan Dekot akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan kepramukaan, terutama yang berkaitan dengan pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda.

“Kami tentu mendukung penuh setiap kegiatan Pramuka, baik dalam momentum Hari Pramuka maupun kegiatan lainnya. Harapannya, Gerakan Pramuka terus berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang berakarakter dan berdaya saing,” pungkasnya. (Adv)

PENGUMUMAN LIKUIDASI

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan RUPS tertanggal 28 April 2026, para pemegang saham **PT. CAKRAWALA BANGUNAN GORONTALO**, yang berkedudukan di Kabupaten Gorontalo (“Perseroan”), diantaranya telah menyetujui dan memutuskan membubarkan Perseroan dengan menunjuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagai Tim Likuidatur Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Tim Likuidatur Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Tim Likuidatur
PT. CAKRAWALA BANGUNAN GORONTALO
(dalam likuidasi)

ANDA INGIN

Berlangganan Koran
Gorontalo Post

atau

KORAN ANDA BELUM DIANTAR AHRI INI

Hubungi :
0812-4470-554

GORONTALO POST
750 Himpunan Kota Dikembangkan
METRO POLES
SINAR HATI

J&T CARGO
GORONTALO 907A

100% Dijamin Ekonomis

☎ 0853 9448 8783 ☎ 0822 9309 9280 ☎ 0821 9588 2277

J&T Cargo Gorontalo Post
KIRIM CEPAT, MURAH & BISA BANYAK

Alamat : Jl. Dr. Jhon Aryo Katili No.144 Kel. Paguyaman
Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo

RENUNGAN ROHANI
BE RADIO - 94.3 FM
SETIAP HARI 08.00 WITA

CITY HARVEST CHURCH INDONESIA - GORONTALO

JL. WOLTER MONGINSIDI
CONTACT PERSON 0435-829392
WHATSAPP : 085256276914
INSTAGRAM/FACEBOOK : C HARVEST GORONTALO
YOUTUBE : CHC INDO GTO

IBADAH RALLY PRAYER
SETIAP HARI KAMIS PUKUL 19.30 WITA

IBADAH DOA FAJAR VIA ZOOM MEETING
MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED
SETIAP HARI JUMAT PUKUL 05.00 WITA

BEFORE BED (DOA SEBELUM BERISTIRAHAT)
VIA ZOOM MEETING ID: 366 681 7318 - PASSCODE: BLESSED
SETIAP HARI SENIN DAN JUMAT PUKUL 21.00 WITA

GEREJA ANAK (CHILDREN'S CHURCH)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.30 WITA

IBADAH RAYA PAGI (LIVE STREAMING VIA YOUTUBE)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 09.00 WITA

IBADAH RAYA SORE (DI HOTEL ELIZABETH LIMBOTO, SAMPING POLRES)
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

IBADAH STAY : STUDENT-TEENAGE-AND-YOUTH
SETIAP HARI MINGGU PUKUL 17.00 WITA

Perubahan Agenda Kerja Diumumkan

PUNCAK BOTU -GP- Perubahan agenda kerja Deprov Gorontalo masa persidangan ketiga tahun 2025-2026 diumumkan dalam rapat paripurna, kemarin (11/5).

Rapat itu dipimpin Wakil Ketua Deprov La Ode Haimudin. Dalam rapat tersebut diumumkan sejumlah perubahan agenda kerja yang mengalami pergeseran jadwal, mulai dari rapat paripurna pembahasan ranperda, agenda reses, hingga penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Perubahan agenda diawali dengan pergeseran jadwal Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus pembentukan pansus yang semula dijadwalkan pada 11 Mei 2026, bergeser menjadi 18 Mei 2026.

Selain itu, agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tugas DPRD Provinsi Gorontalo yang sebelumnya dijadwalkan pada 1 hingga 5 Juni 2026, diputuskan tidak lagi dimasukkan dalam agenda Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025-2026.

Perubahan juga terjadi pada jadwal penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 oleh BPK-RI yang semula dijadwalkan pada 25 Mei 2026 dan bergeser menjadi 15 Juni 2026.

Sementara itu, Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya dijadwalkan pada 8 Juni 2026, bergeser menjadi 15 Juni 2026.

Untuk agenda Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya dijadwalkan pada 8 Juni 2026, kini bergeser menjadi 22 Juni 2026. Pelaksanaan reses DPRD yang semula dijadwalkan pada 17 sampai 26 Juni 2026 juga mengalami perubahan menjadi 29 Juni hingga 8 Juli 2026. Selanjutnya, Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 yang semula dijadwalkan pada 29 Juni 2026, bergeser menjadi 13 Juli 2026.

Pada tanggal yang sama, agenda Pengambilan Keputusan terhadap Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo juga mengalami perubahan jadwal dari 29 Juni menjadi 13 Juli 2026. Adapun agenda Penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya dijadwalkan pada 6 Juli 2026, bergeser menjadi 20 Juli 2026. Sementara agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang semula dijadwalkan pada 20 Juli 2026, bergeser menjadi 27 Juli 2026. **(rmb)**



RAPAT paripurna pengumuman perubahan agenda kerja masa persidangan ketiga 2025-2026, kemarin.



RAPAT kerja Komisi III Deprov Gorontalo membahas hasil temuan BPK pada empat paket proyek jalan.

RAKER KOMISI III

Seriusi Temuan BPK di Empat Paket Jalan

PUNCAKBOTU -GP- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap empat paket pekerjaan jalan pada Dinas PUPR-PKP Provinsi, dibahas dalam rapat kerja Komisi III Deprov Gorontalo, kemarin (11/5).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, bersama jajaran anggota Komisi III. Turut hadir Kepala Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Kepala Seksi Bina Marga, serta Divisi Advokasi dan Litigasi Gorontalo Corruption Watch (GCW). Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III Espin Tulie menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas surat yang sebelumnya dilayangkan oleh Gorontalo Corruption Watch kepada Komisi III DPRD pada tahun 2025 lalu. Pembahasan rapat difokuskan pada

persoalan administratif dan temuan terkait pekerjaan infrastruktur jalan yang berada di bawah kewenangan Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo.

Espin mengungkapkan bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam rapat, pihak penyedia jasa atau kontraktor telah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban berupa denda yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Komisi III menghadirkan langsung Kepala Dinas PUPR-PKP beserta jajaran teknis agar informasi yang diterima semua pihak, termasuk GCW, dapat lebih jelas dan akurat,” ujar Espin.

Dalam forum tersebut, turut dibahas mengenai klarifikasi yang sebelumnya disampaikan GCW terkait dugaan keterlibatan oknum tertentu di

lingkungan BPK. Namun demikian, Komisi III menegaskan bahwa persoalan yang berkaitan langsung dengan BPK berada dalam lingkup kemitraan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

Espin Tulie juga menjelaskan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2018, DPRD memang memiliki kewenangan untuk mengundang BPK dalam rapat kerja, namun terdapat prosedur dan batasan tertentu apabila pembahasan dilakukan dalam format Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Sebagai tindak lanjut, hasil rapat tersebut nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo guna menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan dilaksanakannya rapat gabungan antar komisi apabila diperlukan. **(rmb)**

Sekolah Didorong Jadi Ruang Aman

Pencegahan Kekerasan Diperkuat Lewat Edukasi Pelajar

GORONTALO -GP- Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus diperkuat di Provinsi Gorontalo melalui pendekatan edukatif di lingkungan sekolah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan satuan pendidikan menjadi ruang yang aman, inklusif, dan ramah bagi tumbuh kembang peserta didik.

Penguatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan diseminasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tingkat Provinsi Gorontalo yang digelar di

SMA Negeri 1 Mananggu, Kabupaten Boalemo. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Diseminasi diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Gorontalo, bekerja sama dengan Direktorat Bina Masyarakat (Dit Binmas) Polda Gorontalo. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kepala Dinas DPPPA Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menegaskan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter serta penanaman nilai-

nilai saling menghargai di kalangan pelajar.

“Kami menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang nyaman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujar Yana Yanti Suleman.

Ia menekankan bahwa upaya pencegahan tidak dapat dibebankan pada satu pihak semata. Menurutnya, keterlibatan pemerintah, tenaga pendidik, keluarga, hingga masyarakat luas menjadi faktor penentu keberhasilan perlindungan perempuan dan anak.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan

semua pihak, mulai dari pemerintah, guru, keluarga, hingga masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pamin I Subbag Renmin Dit Binmas Polda Gorontalo Ipda Hendra Abdul Rahman, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Debby Habibie, staf DPPPA Provinsi Gorontalo, Kepala SMA Negeri 1 Mananggu, dewan guru, serta para siswa.

Agenda diseminasi diisi dengan pemaparan materi mengenai bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Materi tersebut

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, serta keberanian pelajar untuk melaporkan jika mengalami atau mengetahui tindakan kekerasan.

DPPPA-PMD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor agar perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kapolsek Mananggu berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta berperspektif hak anak dan kesetaraan gender. **(Tr-76)**

Masyarakat Penambang Duduki Kantor Bupati



Puluhan masyarakat penambang yang tergabung bersama Aliansi Lembaga Aksi Bela Rakyat (Labrak), melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Pohuwato.

SAFA MARWAH 7

Warga Keluhkan Jalan Rusak Hingga Atap Bocor

GORONTALO-GP - Warga Perumahan Safa Marwah 7 masih harus menghadapi berbagai persoalan fasilitas dasar yang hingga kini belum juga terselesaikan. Mulai dari jalan rusak, drainase yang belum berfungsi maksimal, banjir saat hujan, hingga kualitas bangunan rumah yang dinilai kurang baik menjadi keluhan yang terus dirasakan penghuni.

Padahal, persoalan tersebut sudah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo. Namun hingga Mei 2026, warga menilai tindak lanjut dari pihak developer masih berjalan sangat lambat. Salah satu warga, Lin Kaida mengatakan, setelah RDP berlangsung memang ada pekerjaan yang mulai dilakukan oleh developer. Akan tetapi, pengerjaannya sering terhenti, sehingga progres pembangunan dinilai tidak signifikan.

“Yang dikerjakan sekarang baru drainase dan masjid, tetapi pengerjaannya lambat sekali. Awalnya cuma dilakukan penggalian, lalu berhenti cukup lama. Beberapa bulan kemudian baru dilanjutkan lagi,” ujarnya.

Kondisi jalan menjadi persoalan yang paling sering dikeluhkan warga. Saat hujan turun, jalan di kawasan perumahan berubah menjadi becek dan dipenuhi genangan air, karena saluran drainase belum selesai. Sebaliknya, ketika cuaca panas, debu dari jalan tanah mengganggu aktivitas warga setiap hari.

Warga menyebut kawasan yang paling terdampak berada di Blok H, terutama bagian bawah perumahan yang dekat dengan aliran kuala. Daerah tersebut kerap mengalami

genangan karena saluran utama drainase belum tersedia. Menurut warga, pembangunan perumahan seharusnya diawali dengan penyediaan saluran pembuangan air yang memadai, agar air tidak tertahan di lingkungan rumah warga.

“Harusnya saluran utama diselesaikan dulu. Sekarang air hanya tertahan di pertigaan karena drainasenya belum tembus,” katanya. Selain persoalan drainase, warga juga mengeluhkan posisi dap air yang terlalu dekat dengan saluran drainase. Kondisi itu menyebabkan air dari got sering masuk kembali ke area dap air rumah warga. Keluhan lainnya datang dari kualitas bangunan rumah. Sejumlah warga mengaku mulai menemukan kerusakan pada rumah yang mereka tempati, meski usia bangunan belum terlalu lama. Bahkan ada rumah warga yang atapnya sudah mengalami kebocoran, namun hingga kini belum juga diperbaiki oleh pihak developer. “Kalau hujan air masuk dari atap, tapi sampai sekarang belum ada perbaikan,” ungkap salah seorang penghuni.

Warga mengatakan, dalam RDP sebelumnya pihak developer tidak hadir langsung dan hanya diwakili kuasa hukum. Saat itu, pihak perwakilan developer berjanji akan membahas seluruh permintaan warga terkait fasilitas umum dan sosial. Namun hingga sekarang, warga belum melihat perkembangan berarti. Pembangunan masjid di kawasan perumahan pun dinilai belum menunjukkan progres yang jelas. Sejak mulai dikerjakan, pembangunan disebut beberapa kali terhenti dan saat ini diperkirakan baru mencapai sekitar 30 persen. Warga berharap pemerintah

dapat mengambil langkah tegas agar developer segera menyelesaikan kewajibannya, termasuk pembangunan drainase, jalan lingkungan, fasilitas umum, serta perbaikan rumah yang mengalami kerusakan.

“Kami hanya ingin hak kami dipenuhi. Jangan nanti ada pemeriksaan atau kunjungan baru pekerjaan berjalan lagi,” harap Lin Sementara itu, ditempat berbeda Roy Dude, perwakilan dari PT. Alif, bagian lapangan mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam pembangunan Perumahan Safa Marwah 7, dan saat ini pihaknya masih melakukan pembenahan, terutama pada pekerjaan jalan, saluran drainase, dan pembangunan masjid.

“Untuk drainase utama yang sedang dikerjakan, saat ini progresnya tinggal pemasangan plat deker penyambung. Minggu ini, saya juga sudah berkoordinasi dengan pihak developer terkait pembangunan IPAL sesuai master plan.

IPAL ini nantinya menjadi tempat penampungan limbah dari seluruh penghuni Safa Marwah, sebelum dialirkan ke Sungai Bolango dalam kondisi yang sudah melalui proses penyaringan, sehingga air yang keluar lebih bersih dan tidak mencemari lingkungan,” jelas Roy saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di Kantor Pemasaran Perumahan Safa Marwah, Senin (11/5/2026).

Terkait jalan, sebelumnya pihaknya sudah mengajukan PSU ke Dinas Perkotaan Gorontalo. Namun memang ada keterlambatan dalam kelengkapan berkas, sehingga prosesnya ikut tertunda. Meski begitu, pihak Perkotaan juga membantu dalam proses pengusulan PSU tersebut, khususnya untuk perbaikan jalan. Insya Allah akan segera ditindaklanjuti.

“Sedangkan untuk persoalan atap bocor di beberapa rumah, kami juga sudah melakukan perbaikan dan bahkan ada unit yang dibangun ulang. Berdasarkan evaluasi di lapangan, beberapa kerusakan diduga terjadi setelah penghuni melakukan pengembangan bangunan, seperti penambahan dapur. Meski demikian, kami tetap melakukan pengecekan dan perbaikan sebagai bentuk tanggung jawab developer,” pungkash Roy. (Tr-76)

Sampaikan Sejumlah Tuntutan, Pemda dan DPRD Bakal Temui Perusahaan

GORONTALO-GP - Sejumlah masyarakat penambang yang tergabung bersama Aliansi Lembaga Aksi Bela Rakyat (Labrak), melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD dan Pemda Pohuwato, Senin (11/5) sekitar pukul 11.00 Wita. Aksi itu sendiri dipimpin oleh Koordinator lapangan Soni Samoe.

Dalam kesempatan itu, masa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan mereka. Diantaranya, menghentikan segala bentuk intimidasi dan tindakan represif terhadap penambang tradisional, membuka kembali dan memulihkan akses jalan masyarakat yang telah di tutup atau ditimbun, memberi perlindungan nyata terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat kecil, mendesak pemerintah dan pihak perusahaan untuk membangun pola hubungan yang adil dan berkelanjutan, di manakoperasi dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa saling mengganggu.

Selain itu, melalui selebaran yang diserahkan kepada Wabup Iwan S. Adam, masyarakat aksi menyampaikan sejumlah pernyataan sikap. Diantaranya, mendesak PT Merdeka Cooper Gold agar menghentikan segala aktivitas perusahaan yang merusak talang, pondok, akses, dan sarana penambang tradisional di wilayah Nanasi, Borose, dan Alamotu, sebelum ada kesepakatan ganti rugi/tali asih. Mereka pula mendesak pemerintah hadir melindungi hak hidup masyarakat penambang tradisional, yang telah ada sejak puluhan tahun lalu. Meminta perusahaan menghormati keberadaan

dan sejarah masyarakat lokal, bukan menjadikan rakyat sebagai korban investasi. Mendesak aparat penegak hukum bersikap adil dan tidak memihak kepentingan modal semata, serta menjadi alat represif dalam mengintimidasi masyarakat

Menanggapi tuntutan itu, Wabup Iwan S. Adam menyampaikan, terima kasih kepada masa aksi yang telah menyampaikan aspirasinya. Selain itu, terkait dengan pembentukan tim 7, ini dibentuk oleh provinsi guna menyelesaikan persoalan taliasih. Sedangkan mengenai talang-talang yang rusak dari sebagian lokasi yang belum terbayarkan, pihaknya telah mengirimkan orang di lokasi. Dan benar, pihak perusahaan telah melakukan tindakan tersebut, tanpa melakukan diskusi terlebih dahulu atas apa hak-hak dari penambang.

“Saya bersama Pak Bupati sudah berdiskusi atas persoalan ini. Dan saya meminta data atas kerugian dari para penambang. Nantinya data tersebut akan kami bawa ke perusahaan. Terkait dengan tuntutan dari masa aksi, ini masih kami koordinasikan dengan pihak perusahaan,” kata Wabup Iwan S. Adam.

Setelah melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan, Wabup Iwan S. Adam kembali memberikan penyampaian kepada masa aksi. Dikatakannya, pihak perusahaan tetap melanjutkan aktivitas mereka di perusahaan.

“Kami sudah berusaha menghubungi Pak Boike dan Pak Mahesa, dan mereka tetap pada keputusannya yakni, melarang para penambang berada di wilayah konsesi perusahaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, S.E. menambahkan, pemerintah sudah mengkomunikasikan

apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Hanya saja, dari pihak perusahaan tetap akan melakukan aktivitas pertambangan. Meski demikian kata Hamdi, pihaknya bersepakat bahwa akan tetap berupaya mencari solusi, terkait apa yang menjadi tuntutan massa aksi. Masih ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan. Pihaknya akan berkolaborasi dengan stakeholder lain, yang nantinya hasil ini akan dibawa ke Gubernur Gorontalo. Kalau pun tidak bisa, pihaknya tetap berupaya akan sampai ke tingkat pusat.

“Pihak perusahaan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Meski demikian, kami tidak akan menyerah dengan hal itu. Kami pun meminta agar persoalan ini dapat ditangani dengan kepala dingin, jangan melakukan hal-hal yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain,” harapnya. Hamdi pula mengemukakan bahwa mereka tetap berpihak pada masyarakat. Tentunya akan ada langkah-langkah lain yang bakal ditempuh. Oleh karena itu, sebisanya masyarakat tetap dengan hati yang dingin untuk menuntaskan persoalan ini.

“Kami pihak DPRD akan turun ke perusahaan untuk mencari solusi yang bisa diambil untuk kita semua. Dan meminta didampingi dari pihak masyarakat untuk sama-sama turun dengan kita besok (Hari ini, red) ke perusahaan,” pungkashnya.

Rencana untuk menuju ke lokasi perusahaan itu, mendapatkan sambutan dari masa aksi. Mereka pun memutuskan untuk menginap di halaman kantor bupati, agar dapat ikut bersama-sama dengan pemerintah serta wakil rakyat ke perusahaan. Pelaksanaan aksi unjuk rasa itu pun mendapatkan pengawasan ketat dari pihak Polres Pohuwato. (kif)

Polres Pohuwato Sita Ratusan Botol Miras

POHUWATO-GP - Personel Satuan Narkoba Polres Pohuwato, berhasil menyita ratusan botol minuman keras (Miras) berbagai merek dan puluhan liter jenis cap tikus, dari sejumlah lokasi.

Data yang dirangkum Gorontalo Post, razia Miras dilakukan di wilayah Kecamatan Marisa, Kecamatan Lemito, Popayato, hingga Popayato Timur. Pelaksanaan razia tersebut tidak lain sebagai bentuk tindak lanjut laporan masyarakat, yang mengeluhkan banyaknya peredaran Miras di wilayah Pohuwato. Selain itu, razia pula dilakukan untuk menekan angka kriminalitas dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Pelaksanaan razia itu sendiri dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba, IPTU Budi Abdul Gani, S.H., didampingi KBO IPDA Jani Afanto bersama personel Satresnarkoba, Minggu (10/5). Mereka menasar sejumlah rumah, warung dan lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan Miras tradisional maupun minuman beralkohol lainnya. Hasilnya, di Kecamatan Marisa dan sekitarnya, diamankan barang bukti berupa 72 botol cap tikus



Kasat Narkoba Polres Pohuwato beserta personel, menyita sejumlah Miras dari rumah hingga warung milik masyarakat.

ukuran 600 mililiter, 21 botol bir bintang dan 1 botol jenis kasegaran. Sementara itu, di wilayah Kecamatan Lemito, Popayato hingga Popayato Timur, diamankan 13 botol jenis Kasgaran dan Pinaraci, 32 botol Cap Tikus, 6 botol bir serta 3 galon Cap Tikus dengan total sekitar 66 liter.

Kapolres Pohuwato AKBP H. Busroni, S.I.K., M.H. melalui Kasat Narkoba, IPTU Budi Abdul Gani, S.H. menjelaskan, razia tersebut merupakan upaya Kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif, serta menindaklanjuti keluhan warga terkait peredaran Miras yang dinilai meresahkan.

“Kegiatan ini merupakan respons cepat atas informasi dari masyarakat. Kami

akan terus melakukan razia secara rutin, karena Miras sering menjadi pemicu terjadinya tindak pidana maupun gangguan keamanan lainnya,” ujarnya. Selain melakukan penyitaan, personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat, agar tidak menjual ataupun mengonsumsi Miras, karena dapat berdampak buruk terhadap keamanan lingkungan dan ketertiban umum.

“Kami dari Polres Pohuwato mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, dengan melaporkan segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengganggu Kamtibmas, melalui layanan Call Center 110 Polri yang aktif selama 24 jam dan bebas



Genangan air di jalan Safa Marwah 7 yang sering dikeluhkan warga.

Revolusi Gusnar-Idah: Gorontalo Meledak 7,68%

SEJARAH ekonomi Gorontalo baru saja ditulis ulang. Bukan dengan tinta janji politik. Tapi dengan angka yang meledak.

Badan Pusat Statistik resmi merilis pada Kamis, 7 Mei 2026: ekonomi Gorontalo Triwulan I-2026 melejit 7,68 persen [y-on-y]. Tertinggi dalam lima tahun terakhir. Melibas rata-rata nasional. Membuat provinsi lain di Sulawesi ketar-ketir. Nilai PDRB tembus Rp15,789 triliun hanya dalam tiga bulan.

Ini bukan kenaikan. Ini REVOLUSI. Sebab selama puluhan tahun, Gorontalo terjebak di kubangan 4-5 persen. Tahun 2025 kemarin pun kita masih ngos-ngosan di 5-6 persen. Sekarang, di bawah komando Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah, Gorontalo lompat kelas. Dari provinsi APBD tipis menjadi macan baru ekonomi Kawasan Timur Indonesia.

“Alhamdulillah Berita Resmi Statistik sudah keluar yang menempatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo triwulan I 2026 di angka 7,68 persen. Hasil ini perlu disyukuri dan menggembirakan untuk kita semua,” .kalimat Gubernur Gusnar ini sederhana. Tapi maknanya dalam: Gorontalo sedang berada di jalur cepat menuju visi Gorontalo Maju dan Sejahtera.

Bongkar Dapur Mesin: Ekspor jadi Raja, Tambang Emas Pohuwato Mengamuk

Dari mana datangnya ledakan 7,68 persen ini? BPS membuka dapurnya: ekspor barang/jasa adalah raja. Ini perbedaan utama. Selama ini Gorontalo hidup dari belanja APBD dan konsumsi rumah tangga. Uang berputar di dalam. Ekonomi stagnan. Sekarang, Gorontalo jualan ke luar. Dolar dan rupiah dari luar masuk. Kue ekonomi mengembang.

Siapa pasukan tempurnya? Data BPS menyebut hampir seluruh lapangan usaha tren positif. Tapi bintang utamanya ada empat.

Pertama, Pertanian. Tetap jadi tulang punggung. Jagung, kelapa, dan komoditas lain masih perkasa.

Kedua, Perdagangan dan Konstruksi. Toko hidup, proyek jalan.

Ketiga, Transportasi dan Pergudangan.

Artinya barang bergerak. Logistik jalan.

Keempat, dan ini yang paling spektakuler: Pertambangan emas/tembaga di Pohuwato & Bone Bolango serta Industri Pengolahan.

Kenaikan di dua sektor terakhir ini adalah detonator. Tambang emas Pohuwato menggeliat. Industri pengolahan ikut naik. Artinya satu: hilirisasi mulai menyala. Dulu, emas dikeruk, langsung dikirim mentah. Daerah dapat lubang, pusat dapat uang. Sekarang, mulai ada proses di sini. Mulai ada nilai tambah yang tinggal. Inilah yang membuat ekspor agresif dan PDRB tembus Rp. 15,789 triliun.

APBD Rp 1,5 T: Dalih Orang Kalah, Tantangan Orang Menang

Di tengah pesta 7,68 persen, Gubernur Gusnar Ismail menampar mitos lama yang sudah puluhan tahun jadi kambing hitam: APBD kecil.

APBD Provinsi Gorontalo 2026 hanya Rp1,5 triliun. Dibanding Sulsel, Sulteng, atau Sulut, kita seperti anak bawang. Dulu, setiap kali ditanya mengapa jalan rusak, mengapa irigasi macet, jawabannya klise: “APBD kita kecil, Pak.”

Gubernur Gusnar merobek dalih itu. “Keterbatasan APBD tidak menjadi penghalang untuk meraih prestasi ekonomi yang gemilang,” . Kalimat ini harus dipahat di kantor-kantor pemerintahan.

Buktinya? 7,68 persen itu lahir justru saat APBD Rp1,5 T. Ini membuktikan Gubernur Gusnar-Idah berhasil menggeser mesin ekonomi. Dari mesin APBD yang boros dan lambat, ke mesin investasi, ekspor, dan sektor riil yang agresif dan efisien.

Lalu APBD untuk apa? APBD Rp1,5 T kini jadi “korek api” . Bukan untuk bagi-bagi proyek. Tapi untuk dua hal strategis: pertama, bangun infrastruktur dasar ke sentra produksi. Jalan ke tambang, jalan ke pelabuhan, irigasi ke sawah. Kedua, jaga stabilitas dan kepastian hukum. Pastikan tidak ada pungli. Pastikan izin cepat. Pastikan tidak ada demo anarkis yang bikin investor kabur.

APBD Rp. 1 M untuk jaga stabilitas bisa memancing investasi Rp1 T dari swasta. Inilah jurus baru era Gubernur Gusnar-Idah. APBD kecil, tapi nyali besar.



Oleh : Dedy S. Palyama SE.M.Si

Rahasia Gusnar-Idah: Stabilitas Adalah APBD Tak Kasat Mata

Mengapa investor dan Pusat sekarang percaya Gorontalo? Mengapa ekonomi bisa meledak 7,68%? Jawabannya satu: kepercayaan. Dan kepercayaan itu lahir dari stabilitas.

Investor tidak tanya APBD. Mereka tanya tiga hal: Izin cepat tidak? SDM siap tidak? Daerah aman tidak untuk 20 tahun ke depan?

Gusnar-Idah menjawab tiga hal itu dengan kerja nyata. Forkopimda solid. Konflik lahan diredam di meja dialog sebelum jadi api. Pungutan liar disikat. Premanisme berkedok ormas ditertibkan. Perizinan dipangkas. Pesan ke Jakarta dan ke dunia usaha jelas: Gorontalo buka pintu lebar-lebar, tapi tertib aturan.

Inilah yang disebut “APBD tak kasat mata” . Stabilitas politik, keamanan, dan kepastian hukum nilainya triliunan. Daerah APBD Rp. 10 T pun akan ditinggalkan jika tiap minggu ricuh. Gorontalo APBD Rp1,5 T justru dilirik karena aman dan prediktabel.

Gubener Gusnar menyebut kuncinya adalah “sinergi antar-pemangku kepentingan” . Ini bukan jargon. Ini adalah kerja kolaborasi tanpa sekat antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, TNI-Polri, Kejaksaan, pengusaha, tokoh adat, tokoh agama, hingga media. Ketika semua satu komando menjaga iklim investasi, maka uang datang. 7,68 persen adalah buahnya.

Oleh : Awen Tongkonoo, S.Sos.I., M.H.

473 Tahun 2020 telah memberikan instrumen mitigasi yang sangat presisi. Ketika asas kebenaran dokumen dalam Pasal 6 tidak terpenuhi, maka Pasal 7 secara tegas mewajibkan adanya perbaikan. Jika batas waktu berlalu dan syarat tetap cacat, Pasal 8 mengamankan sebuah tindakan tegas: Penolakan Kehendak Nikah melalui penerbitan Formulir Model N7.

Perlu digarisbawahi bahwa Model N7 bukanlah sekadar surat pemberitahuan biasa. Ia adalah formulir baku dan sah sesuai regulasi pusat yang menjadi perisai hukum bagi Kepala KUA. Dengan menerbitkan Model N7, seorang Penghulu telah memindahkan beban tanggung jawab hukum dari pundaknya kembali ke pundak pemohon, sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menyelesaikan sengketa datanya melalui jalur yang benar di Pengadilan Agama atau Dukcapil.

Namun, mari kita jujur pada diri sendiri.

Mengeksekusi penolakan melalui Model N7 di tengah masyarakat bukanlah perkara

Emas Pohuwato Jangan Cuma Dikeruk, Hilirisasi Harus Tuntas!

Meski pesta 7,68 persen, Gusnar-Idah tidak mabuk pujian. Mereka tahu persis ada PR besar yang menganga: hilirisasi tambang.

BPS menyebut pertambangan emas/tembaga di Pohuwato & Bone Bolango sebagai penopang utama. Tapi fakta di lapangan: sebagian besar emas itu masih diolah di luar Gorontalo. Kita masih mengirimi bahan mentah atau setengah jadi.

Artinya, nilai tambah terbesar belum tinggal di sini. PDRB Rp15,789 triliun hari ini bisa dua kali lipat jika smelter dan refinery berdiri di Bumi Serambi Madinah. Bayangkan ribuan lapangan kerja baru. Bayangkan PAD yang melonjak. Bayangkan perputaran uang di warung, kontrakan, bengkel, dan transportasi.

Karena itu, peringatan keras untuk kita semua: hilirisasi tambang tidak boleh setengah hati. Jangan lagi Gorontalo hanya dapat lubang dan debu. Emas Pohuwato harus jadi emas Gorontalo. Ini adalah perang berikutnya yang harus dimenangkan Gubernur Gusnar-Idah. Jika smelter berdiri, jangan kaget jika tahun depan kita bicara pertumbuhan dua digit.

3 Ranjau Setelah Ledakan 7,68 Persen

Pertumbuhan eksplosif membawa ranjau eksplosif. Ada tiga yang harus dijinakkan Gubernur Gusnar-Idah sekarang juga.

Ranjau Pertama: Gejolak Sosial. Tambang menggeliat, industri naik, konstruksi jalan. Pasti ada gesekan lahan. Pasti ada kecemburuan antara tenaga kerja lokal dan pendatang. Pasti ada yang mencoba memalak investor. Jika tidak dikelola dengan dialog adil dan penegakan hukum tegas, api pertumbuhan bisa padam jadi abu konflik horizontal. Ranjau Kedua: Politik Identitas. Investasi butuh tenaga terampil. Tidak semua ada di Gorontalo. Migrasi tenaga kerja adalah keniscayaan. Isu “putra daerah tersingkir” adalah bom waktu yang sangat mudah disulut jelang Pilkada. Pemprov harus jadi wasit. Buka data tenaga kerja. Genjot BLK. Pastikan warga lokal kompetitif. Jangan beri ruang politisi mainkan isu ini. Ranjau

Ketiga: Bom Waktu Generasi Muda. Gorontalo menikmati bonus demografi: 60% penduduk usia produktif. Ini bisa jadi dividen atau bencana. Data menyebut 89% anak muda dapat info dari TikTok. Mereka lihat angka 7,68% di FYP. Ekspektasi mereka ke langit. Jika Pemprov tidak hadir di TikTok, jika BLK tidak ada di dekat kawasan industri, jika info loker tidak masuk ke mereka, maka 60% ini bisa berubah dari aset menjadi beban. Frustrasi mereka bisa meledak jadi apatisme atau gerakan anarkis.

Penutup: Dari Angka Statistik ke Piring Makan Rakyat

7,68 persen dan Rp15,789 triliun adalah fondasi. Bukan atap. Visi Gorontalo Maju dan Sejahtera yang diusung Gubernur Gusnar-Idah sedang on the track. Tapi pertarungan belum selesai.

Tugas Gubernur Gusnar-Idah sekarang adalah memastikan angka statistik itu menetes ke piring makan rakyat. Menjadi upah layak untuk buruh tambang. Menjadi harga gabah bagus untuk petani. Menjadi ikan mahal untuk nelayan. Menjadi lapak ramai untuk UMKM. Menjadi kerja untuk 60% usia produktif.

Caranya? Satu, kawal hilirisasi tambang sampai tuntas. Smelter harus berdiri. Dua, jaga stabilitas harga. Jangan sampai pertumbuhan 7,68% bikin harga beras dan telur liar. Tiga, jemput bonus demografi. BLK, info loker, dan pelatihan harus masuk ke HP anak muda. Empat, jaga stabilitas. Jangan kasih kendor.

APBD Rp1,5 T sudah terbukti bukan alasan untuk kalah. Nyali, sinergi, stabilitas, dan keberpihakan adalah senjata untuk menang.

Gorontalo di era Gubernur Gusnar-Idah tidak lagi menunggu belas kasihan Pusat. Gorontalo sedang merebut kepercayaan. Dan ketika dipercaya, 7,68 persen hari ini baru permulaan.

Pertanyaannya: siapkah kita mengawal ledakan ini agar tidak jadi bencana? Sebab sejarah mencatat, banyak daerah meledak tumbuh, lalu meledak juga konfliknya. Gorontalo jangan sampai begitu. (*)

Penulis adalah KepalaBidang Politik Dalam Negeri dan Ormas.pada Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo

Bom Waktu di Meja Akad: Menggugat Ketidaksesuaian Nasab dan Urgensi Perlindungan Penghulu

REALITA di lapangan sering kali menempatkan Penghulu di posisi yang serba salah. Salah satu dilema paling klasikâ€”sekaligus paling berbahaya secara hukumâ€”adalah ketika terjadi benturan antara kebenaran formil di dokumen kependudukan dan kebenaran materiil (fakta nasab) pada saat pemeriksaan nikah.

Kerap kali ditemukan identitas ayah di KTP calon pengantin berbeda dengan fakta ayah kandungnya. Modus yang paling sering kita hadapi adalah kasus adopsi sejak bayi. Banyak anak yang sejak lahir langsung “diselundupkan” ke dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran orang tua angkatnya dengan status sebagai anak kandung. Adopsi ini ada yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan, namun tidak sedikit pula yang dilakukan “di bawah tangan” tanpa alas hukum yang jelas.

Di saat hari bahagia tinggal menghitung hari, desakan dari pihak keluarga pun menguat. Mereka biasanya menekan Penghulu dengan dalih administratif: “Tolong sesuaikan saja dengan KTP, KK, dan Akta Lahirnya, Pak Penghulu. Dokumen ini kan resmi dikeluarkan negara, lagipula dia sudah diangkat anak sejak masih bayi!”

Di titik inilah jebakan hukum itu memangga lebar. Harus kita sadari bersama, meskipun sebuah adopsi disahkan oleh Penetapan Pengadilan sekalipun, hukum Islam (syariat) dan hukum perkawinan kita tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab biologis. Jika Penghulu tunduk pada desakan tersebut dan mencatat nama ayah angkat sebagai bin/binti demi “kelancaran acara”, kita sejatinya sedang menanam bom waktu.

Preseden buruk telah membuktikan hal ini: sebuah pernikahan pernah dicatat mengikuti dokumen kependudukan (menggunakan nama ayah angkat) tanpa koreksi nasab yang valid. Bertahun-tahun kemudian, sang ayah angkat meninggal dan muncul gugatan sengketa waris dari keluarga besar. Siapa yang menjadi sasaran tembak? Penghulu. PPN disalahkan karena dianggap lalai menjalankan fungsi pengawasan dan menerbitkan akta otentik yang datanya bertentangan dengan hukum nasab.

Secara regulasi, marwah administrasi KUA sebenarnya sangat kuat. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor

yang mudah. Ada tekanan sosial yang masif, hingga stigma bahwa KUA “mempersulit umat”. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini menuntut dua hal fundamental:

Pertama, nyali dan integritas dari para Penghulu. Menolak dokumen yang cacat materiil bukanlah sebuah arogansi birokrasi. Tindakan tersebut justru wujud nyata perlindungan negara terhadap status keperdataan masyarakat itu sendiri di masa depan, sekaligus upaya memagari karier ASN kita dari delik maladministrasi.

Kedua, payung perlindungan dari pemangku kebijakan. Ketegasan Penghulu di lapangan mutlak membutuhkan dukungan moral dan komitmen struktural dari pimpinan, baik di level Eselon II, III, maupun IV. Ketika seorang Kepala KUA atau Penghulu menerbitkan Model N7 demi menegakkan aturan, kehadiran pimpinan untuk “pasang badan” adalah napas bagi kami. Tanpa perlindungan pimpinan yang tegak lurus pada aturan, Penghulu akan terus menjadi bumper yang rentan dipersalahkan oleh masyarakat.

Sebagai langkah mitigasi yang konkret, KUA Kecamatan Suwawa telah memformulasikan satu kesatuan paket instrumen

perlindungan administratif” yang terdiri dari Formulir Model N7 (Baku), SPTJM Kebenaran Data Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan Nasab, hingga SK Penundaan Pencatatan. Seluruh dokumen ini disusun dengan merujuk ketat pada PMA 30/2024 dan Kepdirjen 473/2020.

Rangkaian dokumen ini bukanlah sekadar lembaran kertas tambahan, melainkan legal shield (tameng hukum) jika kelak keputusan administrasi kita diuji di Pengadilan. Instrumen ini sangat relevan untuk dikaji bersama, disempurnakan, dan idealnya dapat diadopsi menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang seragam bagi seluruh Penghulu se-Provinsi Gorontalo.

Menutup catatan ini, mari kita kembali merapatkan barisan. Keselamatan administrasi negara, marwah institusi, keabsahan syariat, dan kepastian hukum masyarakat ada di ujung pena kita. Bekerja cerdas, tuntas, dan berlindung di balik benteng regulasi adalah jalan terbaik.

SUWAWA MANTAP (MeAyani Tanpa Pamrih). (*)

Penulis adalah Kepala KUA Kec. Suwawa

HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI GORONTALO

GORONTALO Post

Penerbit : PT. GORONTALO CEMERLANG
Pembina : Dahlan Iskan
Komisaris Utama : Imawan Mashuri
Komisaris : Urief Hasan
Direktur Utama : Moh. Sirham
Direktur : Haryono
Direktur Marketing : Hariyanto Hamzah

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Jitro Paputungan

■ DIVISI PRODUKSI

Redaktur Pelaksana: Roy Tilameo, Rahmat Malik.
Redaktur: Zulkifli Tampolo. **Staf Redaksi**: Deice Pomingolo, Caisar Ntoma, Diyanti T. Niyode, Sekretaris Redaksi: Agustina Said. **Koordinator HRD**: Chicilia Novistiuti Arifin. **Koordinator IT**: Aslan Akuba

■ DIVISI ART & PERWAJAHAN

Risdiyanto Karim, Nasir Hantono, Apri Ahmad. **Design Grafis**: Muhammad Syukri

■ DIVISI USAHA

Manager Keuangan: Elvin Ambo. **Adriyanti Kadir (adm)**. **Manager Iklan**: Hariyanto Hamzah.

Staf Iklan: Aminum Humola, Surya Muhamad **Design Iklan**: Oman Nasiboe.

Manager Sirkulasi & Pemasaran: Yusuf Saleh. **Pemasaran Koran**: Buyung Tanjung, Yersi Ismail, Welniaty Ahaya (adm).

■ LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN

Tarif Iklan: Umum Rp. 30.000,-/mmk (hitam putih/BW), Rp 40.000,-mmk (berwarna/FC). **Mungil**: Rp 35.000 (satu kali muat). **Advertorial**: Rp 22.500,-mmk (berwarna), Rp 15.000,-mmk (hitam putih/BW). **Harga Langganan Koran**: Rp 150.000 (luar kota tambah ongkos kirim)

■ ALAMAT

Kantor Pusat: GEDUNG GRAHA PENA GORONTALO
Jln. Jhon A. Katili (Eks Jln. Andalas). No. 144 Kota Gorontalo. Telepon: (0435) 827551.
E-mail Redaksi: redaksi_gp@yahoo.com, redaksi.gpost@gmail.com, Hargo.co.id.
E-mail Iklan: iklan_gp@yahoo.com, iklangp@yahoo.com. E-mail Sirkulasi & Pemasaran: marketing_gp@gmail.com.

Perwakilan Jakarta: Jln. Kebayoran Lama no. 12 Jakarta Barat.
Surabaya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya, Jawa Tlmur.

HUT Bone Bolango Jatuh Dibulan Februari

Tekan Angka Putus Sekolah SPM Pendidikan Fokus Kualitas Belajar

TILONGKABILA-GP—DPRD Bone Bolango meminta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi semata. Anggota DPRD Bone Bolango, Amin Nusi menegaskan, SPM pendidikan harus benar-benar memberi dampak langsung terhadap kualitas belajar siswa di sekolah.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Pemenuhan indikator SPM dinilai tidak cukup hanya sebatas laporan administrasi maupun pembangunan fisik, tetapi harus mampu mendorong peningkatan literasi siswa, menciptakan iklim belajar yang aman, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di setiap sekolah.

Amin menjelaskan, sektor pendidikan merupakan urusan wajib yang harus dijalankan pemerintah daerah secara maksimal. Karena itu, DPRD meminta Pemda Bone Bolango memastikan setiap program pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan peserta didik dan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan belajar siswa.

Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah menjamin seluruh peserta didik memperoleh hak pelayanan pendidikan secara minimal sebagaimana yang telah diatur. Salah satu perhatian penting yang turut disoroti yakni upaya meminimalisir angka anak putus sekolah agar seluruh anak di Bone Bolango tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

“Urusan wajib yang dilaksanakan di bidang pendidikan DPRD meminta standar pelayanan minimal SPM bidang pendidikan fokus pada peningkatan kualitas belajar siswa dan bukan sekedar administrasi pemenuhan indikator spm harus berdampak langsung pada literasi iklim keamanan dan kualitas pembelajaran bukan hanya laporan fisik.

Seiring hal itu DPRD meminta pemda wajib menjamin setiap peserta didik mendapatkan hak pelayanan pendidikan secara minimal termasuk meminimalisir angka anak putus sekolah,” urainya. (csr)



JAJARAN aleg Tabula direses belum lama ini.

(FOTO HUMAS)

Usai Dibahas Bersama, Bapemperda Pastikan Pembahasan Belum Final

TILONGKABILA-GP – Usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bone Bolango mulai dibahas bersama sejumlah pihak terkait. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bone Bolango memastikan pembahasan tersebut mulai mengerucut pada perubahan waktu perayaan HUT Bone Bolango yang kemungkinan besar akan diperingati pada bulan Februari.

Ketua Bapemperda DPRD Bone Bolango, Romi Mohamad mengatakan, dalam pembahasan terakhir mulai ditemukan titik temu terkait penetapan waktu HUT Bone Bolango. Menurutnya, usulan yang berkembang sebelumnya sempat mengarah pada tanggal 6 Mei mengikuti momentum peresmian penyelenggaraan pemerintahan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pelantikan penjabat bupati. Sementara selama ini, berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018, HUT Bone Bolango diperingati setiap 27 Januari. Namun dari hasil pembahasan sementara, mayoritas pandangan mengarah pada akhir Februari, menyesuaikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato sebagai daerah otonom baru.

“Pembahasan revisi HUT Bone Bolango sudah kami lakukan dan alhamdulillah mulai menemukan titik temu. Awalnya ada yang mengusulkan tanggal 6 Mei, namun karena mengacu pada ditetapkannya UU pembentukan Bone Bolango pada Februari 2003, maka pembahasannya mengarah ke bulan Februari. Jadi yang sebelumnya 6 Mei lalu berubah ke 27 Januari, kini kembali mengacu pada momentum lahirnya undang-undang pembentukan daerah,” ujar Romi. Ia menegaskan, pembahasan tersebut belum final karena masih akan melalui tahapan lanjutan serta melibatkan banyak unsur, termasuk pihak eksekutif dan berbagai elemen masyarakat.

Sebagaimana diketahui, revisi Perda Nomor 6 Tahun 2018 diusulkan untuk mempertegas dasar hukum pelaksanaan HUT Bone Bolango agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato. Dalam prosesnya, banyak pihak berharap pembahasan dilakukan secara komprehensif dan tidak sekedar melihat aspek seremoni tahunan. Revisi tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kajian akademis, data sejarah yang valid, aspek yuridis, filosofis, hingga sosiologis agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan identitas, sejarah, serta semangat persatuan masyarakat Bone Bolango. (csr)

Sofyan Wahidji Perjuangkan Perbaikan SDN 7 Bulango Utara

TILONGKABILA-GP—Anggota DPRD Bone Bolango, Sofyan Wahidji memastikan akan kembali memperjuangkan anggaran perbaikan bangunan di SDN 7 Bulango Utara yang hingga kini belum seluruhnya diperbaiki pasca insiden kebakaran beberapa tahun lalu. Dari tiga ruang yang terdampak kebakaran, baru dua ruang yang mendapat perbaikan, sementara satu ruang kelas dan gudang masih dalam kondisi rusak. Kondisi tersebut diketahui langsung Sofyan saat turun melaksanakan agenda reses belum

lama ini. Ia mengaku prihatin melihat bangunan bekas kebakaran yang sudah bertahun-tahun masih tampak kontras dibanding bangunan lain di lingkungan sekolah tersebut. Menurutnya, kondisi itu tentu mempengaruhi kenyamanan serta kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.

Sofyan menilai ruang yang belum diperbaiki merupakan fasilitas penting yang sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pendidikan. Karena itu, ia bersama anggota

DPRD dari daerah pemilihan Tapa-Bulango atau Tabula berkomitmen untuk memperjuangkan intervensi anggaran agar sisa bangunan yang rusak dapat segera diperbaiki melalui APBD tahun depan.

“Insya Allah setelah kami turun reses, kami sepakat akan berupaya memperjuangkan anggaran di APBD 2027 untuk perbaikan. Karena dari tiga lokal yang terbakar, baru dua lokal diperbaiki sehingga masih ada satu lokal dan gudang,” ujar Sofyan. (csr)

PKB Perketat Rekrutmen Pemimpin

800 Calon Ketua DPC Jalani UKK Tahap Dua

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (UKK) bagi calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Pulau Jawa. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses konsolidasi dan penguatan struktur partai dalam menyiapkan kepemimpinan yang solid, visioner, dan profesional di semua tingkatan.

Ketua DPP PKB Bidang Penguatan

Organisasi, Eksekutif dan Legislatif Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim menyatakan UKK tahap kedua merupakan tindak lanjut dari assesment dan kompetensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“UKK tahap dua ini adalah tindak lanjut dari UKK tahap satu berupa assesment dan menguji kompetensi. Pelaksanaannya dibagi menjadi lima tahap mulai tanggal 11 sampai 15 Mei 2026,” kata Gus Halim di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat, Senin (11/5). Gus Halim menjelaskan pada hari pertama pelaksanaan terdapat 120 calon Ketua DPC PKB

se-Pulau Jawa yang mengikuti proses UKK dari total sekitar 800 calon yang akan mengikuti tahapan serupa.

“Mereka diuji langsung oleh pengurus inti DPP PKB mulai dari komitmen perjuangan partai, visi-misi kepemimpinan, kapasitas organisasi, hingga sisi profesionalitas,” kata Gus Halim.

Selain untuk DPC di Pulau Jawa, DPP PKB juga memastikan proses UKK dilaksanakan secara menyeluruh bagi di luar wilayah Jawa. Pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dengan pengujian dari DPP PKB agar standar

penilaian dan kualitas kepemimpinan tetap seragam secara nasional.

Menurutnya, UKK menjadi instrumen penting bagi PKB untuk memastikan seluruh pemimpin partai memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, loyal terhadap ideologi partai, serta mampu menjawab tantangan politik dan kebutuhan masyarakat ke depan.

Gus Halim menegaskan proses UKK bukan hanya berlaku bagi calon pemimpin tingkat DPC, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun kultur meritokrasi di seluruh struktur partai.

Dia menjelaskan hal ini menjadi penting agar setiap pemimpin PKB di semua tingkatan benar-benar memiliki kapasitas, loyalitas, integritas, dan kemampuan kerja organisasi. “Partai membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga mampu bekerja, menggerakkan kader, serta hadir di tengah masyarakat,” tegasnya. Melalui proses UKK ini, DPP PKB berharap lahir kepemimpinan partai yang semakin kuat, modern, dan mampu menjadi motor perjuangan politik kerakyatan di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sebagai basis utama PKB. (jppn)



Sekda Dorong Budaya Inovasi dan Perlindungan HKI

GORONTALO - GP - Pemerintah Kota Gorontalo terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan melalui kegiatan Sosialisasi Inovasi Daerah dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), Senin (11/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Banthayo Lo Yiladia itu menjadi wadah untuk mendorong lahirnya berbagai gagasan kreatif sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil inovasi.

Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid, menegaskan bahwa inovasi kini menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah di tengah perkembangan zaman yang terus berubah.

"Daerah tidak lagi hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi sangat ditentukan oleh kemampuan untuk berinovasi. Inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat daya saing daerah di tengah perubahan yang sangat cepat," ujar Ismail. Menurutnya, setiap terobosan yang lahir dari pemerintah maupun masyarakat perlu memiliki perlindungan hukum yang jelas melalui Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut dinilai penting agar karya dan inovasi yang dihasilkan tidak mudah diklaim pihak lain serta memiliki kepastian keberlanjutan.

"Perlindungan HKI memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kita ingin setiap inovasi yang lahir di Kota Gorontalo memiliki pondasi yang kuat," tambahnya.

Ismail juga berharap inovasi yang dikembangkan tidak berhenti sebatas program atau gagasan awal, tetapi mampu memberi dampak ekonomi jangka panjang bagi daerah. Ia mendorong agar inovasi yang telah berjalan dapat diproteksi melalui HKI sehingga berpotensi menjadi nilai tambah ekonomi bahkan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). "Saya berharap inovasi yang kita hasilkan tidak berhenti saat diluncurkan saja. Inovasi tersebut harus diproteksi melalui HKI agar mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang dan nilai tambah yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo," pungkasnya. Melalui kegiatan tersebut, Baperida Kota Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi aparat maupun masyarakat dalam pengurusan HKI serta pengembangan inovasi daerah yang lebih adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan. (adv)



Sekda Kota Gorontalo, Ismail Madjid ketika membuka kegiatan Sosialisasi Inovasi Daerah dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), Senin (11/5/2026).

UMKM STREET FOOD BUKAN SEKADAR BIKIN CUAN PEDAGANG

Balap Liar Pun Mampu Diredam



Wali Kota Gorontalo, Adnan Dambea ketika menerima cendera mata dari Ketua BPD HIPMI Provinsi Gorontalo, Rusli Anwar Achmad, di sela-sela kegiatan UMKM Street Food, Ahad (10/5/2026).

Pemkot Apresiasi Scooter Land Kods Mayday



Sekda Kota Gorontalo, Ismail Madjid pada penutupan kegiatan Scooter Land Kods Mayday yang dipusatkan di Lapangan Taruna Remaja resmi berakhir pada Sabtu malam (9/5/2026).

GORONTALO - GP - Gelaran Scooter Land Kods Mayday yang dipusatkan di Lapangan Taruna Remaja resmi berakhir pada Sabtu malam (9/5/2026).

Penutupan kegiatan dilakukan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid, mewakili Wali Kota Gorontalo yang pada saat bersamaan menerima kunjungan tamu negara.

Dalam sambutannya, Ismail menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan komunitas Vespa yang dinilai sukses menyelenggarakan kegiatan berskala regional tersebut. Ia secara khusus memberikan penghargaan kepada Arter Dotulong Solang selaku Ketua Komunitas Vespa Gorontalo yang turut mengoordinasikan jalannya kegiatan.

Menurut Ismail, antusiasme peserta terlihat sangat tinggi, terutama saat agenda touring mengelilingi sejumlah ruas jalan di Kota Gorontalo yang dipadati pecinta Vespa dari berbagai daerah.

"Peserta yang hadir bukan hanya dari Gorontalo, tetapi juga dari Manado, Sulawesi Utara, hingga Sulawesi Tengah. Ini menunjukkan event seperti ini punya daya tarik besar," ujar Ismail. Ia menilai perkembangan komunitas Vespa di Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan

yang cukup pesat. Pemerintah daerah, kata dia, memandang kegiatan komunitas bukan sekadar ajang berkumpul, tetapi juga memberi kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, sejumlah kawasan di Kota Gorontalo tampak ramai dipadati masyarakat dan pelaku usaha, mulai dari Jalan Nani Wartabone, Jalan Agus Salim, hingga area sekitar Universitas Negeri Gorontalo.

Kondisi tersebut dinilai menjadi bukti bahwa event komunitas mampu menciptakan perputaran ekonomi bagi pelaku UMKM dan usaha kecil di daerah.

Ismail juga berharap Scooter Land Kods Mayday dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik komunitas Vespa dari berbagai wilayah Indonesia untuk datang ke Gorontalo.

Menutup sambutannya, ia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh panitia atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan dan berharap event serupa dapat hadir dengan skala yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang. (adv)

GORONTALO - GP - Kawasan jalan dari Rumah Dinas Gubernur hingga McDonald's yang sebelumnya kerap dikenal sebagai titik balap liar, kini berubah menjadi pusat keramaian pelaku UMKM dan wisata kuliner malam melalui program UMKM Street Food.

Aktivitas yang menghadirkan ratusan pedagang tersebut ternyata tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga ikut menciptakan suasana yang lebih tertib dan aman di kawasan itu.

Kepala Kesbang Kota Gorontalo, Dandy Datau, mengatakan selama kegiatan berlangsung, aksi balap liar yang biasanya muncul di lokasi tersebut nyaris tidak terlihat lagi.

"Alhamdulillah balap liar sudah tak ada di lokasinya," ujar Dandy saat meninjau pelaksanaan UMKM Street Food bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo,

Muttaqin Adam, Ahad (10/5/2026).

Menurut Dandy, Pemerintah Kota Gorontalo melihat pemanfaatan ruang publik lewat kegiatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu cara efektif dalam menekan gangguan ketertiban di wilayah perkotaan.

Ia menilai kehadiran aktivitas positif yang melibatkan masyarakat mampu mengubah fungsi kawasan yang sebelumnya rawan menjadi lebih produktif dan hidup.

Dengan konsep kuliner terbuka yang dipadukan dengan aktivitas sosial masyarakat, UMKM Street Food dinilai memberi manfaat ganda, baik bagi pelaku usaha kecil maupun bagi situasi keamanan lingkungan.

"Bersama aparat keamanan, kami juga terus melakukan pengawasan agar aktivitas kuliner tetap berjalan tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas maupun kenyamanan warga sekitar," pungkasnya. (adv)



UMKM Street Food yang dihadirkan Pemkot Gorontalo mampu meredam aksi balap liar. (FOTO: PROKOPIM)

POSISI KAS DAERAH PER 09 Mei 2026

I	Posisi Saldo Kas BUD per 08 Mei 2026 :	56.898.232.032,38
-	Penerimaan Kas Daerah per 09 Mei 2026	110.984.291,00
-	Pengeluaran Kas Daerah per 09 Mei 2026	-
II	Saldo Akhir per 09 Mei 2026	57.009.216.323,38

Gorontalo, 10 Mei 2026
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO
SELAKU BUD

Ttd
NURYANTO, Ak.M.Ec.Dev.CA
PEMBINA UTAMA MUDA